



KEMKOMINFO

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2020



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAPORAN KINERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

2020



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai Badan Litbang SDM) dalam melaksanakan pembangunan serta bentuk pertanggungjawaban Badan Litbang SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tema kebijakan APBN pada tahun anggaran 2020 berpusat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus pengembangan SDM terutama demi modal ekonomi berbasis digital agar bonus demografi Indonesia tidak sia-sia sekaligus menjadi bonus lompatan kemajuan untuk membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tahun 2020-2024 diharapkan menjadi momentum untuk tujuan tersebut sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia'.

Disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor baik penerapan otomatisasi, *artificial intelligence*, *big data*, *internet of things* (IoT) harus diantisipasi termasuk pada perubahan demografi, profil sosio-ekonomi dari populasi yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.

Pandemi Covid19 yang melanda di tahun 2020 sekaligus menjadi momen adaptasi sistem pendidikan, baik pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada. Pada pertengahan tahun 2020 Presiden Jokowi menekankan beberapa hal, yakni:

- 1) Cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan hari ini. Pembentukan SDM unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu;
- 2) SDM unggul yang ingin dibangun adalah SDM berkarakter, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.
- 3) Ada target-target yang terukur
- 4) Reform tidak hanya ditentukan satu kementerian, tapi memerlukan dukungan komunitas pendidikan. Diperlukan dukungan kementerian/lembaga, masyarakat, pemerintah daerah, dan juga kemitraan dengan swasta. Karena reformasi pendidikan bukan hanya mencangkup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian, tetapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan.¹

¹ <https://setkab.go.id/selain-ingin-sdm-unggul-berkarakter-ini-4-arahan-presiden-soal-peta-jalan-pendidikan-2020-2035/>

Untuk mendukung pernyataan Presiden tersebut, tahun 2020 fokus Badan Litbang SDM pada pengembangan SDM ditunjukkan dengan 1 (satu) Sasaran Program yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator pendukung pengembangan SDM yang akan menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024.

Laporan Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang capaian Badan Litbang SDM selama tahun 2020 serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program penelitian dan pengembangan SDM. Sangat kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dalam menggambarkan akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun melalui Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mendorong pembangunan bidang komunikasi dan informatika khususnya menumbuhkan kembangkan budaya riset dan akselerasi pengembangan sumber daya manusia Indonesia serta menggambarkan kinerja dan kinerja tambahan yang kami hasilkan.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung Badan Litbang SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terjalin dengan baik di waktu-waktu selanjutnya.

Jakarta, Februari 2021


Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

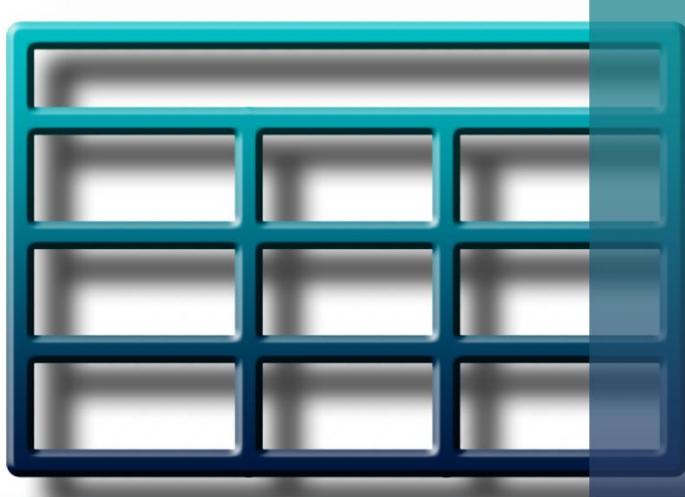
HARY BUDIARTO

Dr. Hary Budiarto M.Kom



DAFTAR ISI

II	KATA PENGANTAR
IV	DAFTAR ISI
V	DAFTAR TABEL
VIII	DAFTAR GAMBAR
X	DAFTAR LAMPIRAN
XI	RINGKASAN EKSEKUTIF
1	BAB I PENDAHULUAN
2	A. LATAR BELAKANG
12	B. TUGAS DAN FUNGSI
20	C. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LITBANG SDM
22	BAB II PERENCANAAN KINERJA
24	A. SASARAN PROGRAM
34	B. INDIKATOR KINERJA
36	C. PERJANJIAN KINERJA
51	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
52	A. CAPAIAN KINERJA
53	- SP1. DIMANFAATKANNYA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
82	- SP2. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
105	- SP3. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA BADAN LITBANG SDM
116	B. REALISASI ANGGARAN
123	PENUTUP

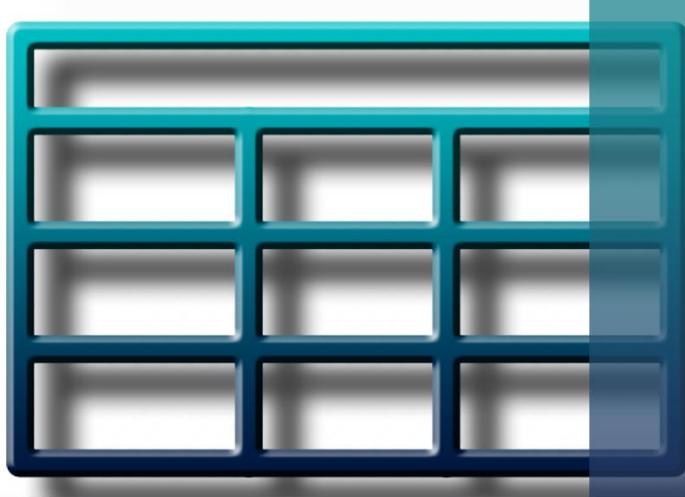


DAFTAR TABEL

14	Tabel 1.1	Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo
16	Tabel 1.2	Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo
23	Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
24	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Program
37	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2020
40	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020
49	Tabel 2.5	Target Perjanjian Kinerja Versi Januari dan Juni 2020
52	Tabel 3.1	Capaian Kinerja Badan Litbang SDM
54	Tabel 3.2	IKSP 1.1. Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika
62	Tabel 3.3	Konsensus Pengaturan Umum
62	Tabel 3.4	Konsensus Pengaturan LCN
63	Tabel 3.5	Konsensus <i>Receiver Behavior</i>
65	Tabel 3.6	<i>Survey Online Focus Group Discussion</i> Selama Bulan Juni 2020
66	Tabel 3.7	<i>Survey Analisis Media Online</i> Kominfo
75	Tabel 3.8	<i>Feedback</i> Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2020
78	Tabel 3.9	Penelitian Aspirasi Daerah

DAFTAR TABEL

- 82 **Tabel 3.10** IKSP 2.1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship (DTS)*
- 85 **Tabel 3.11** Rincian Peserta DTS Dari Setiap Akademi
- 90 **Tabel 3.12** IKSP 2.2. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy* yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.
- 93 **Tabel 3.13** Survei Alumni DTS
- 100 **Tabel 3.14** IKSP 2.3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis
- 101 **Tabel 3.15** Kualifikasi Kelulusan Diklat Tahun 2020
- 102 **Tabel 3.16** Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
- 103 **Tabel 3.17** Sumber Dana Program Diklat Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang Tahun 2020
- 105 **Tabel 3.18** IKSP 3.1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM
- 108 **Tabel 3.19** IKSP 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM
- 109 **Tabel 3.20** Rincian Nilai Perkomponen
- 110 **Tabel 3.21** IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 (1)



DAFTAR TABEL

- 111 **Tabel 3.22** IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 (2)
- 112 **Tabel 3.23** IKSP 3.4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN
- 113 **Tabel 3.24** Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
- 114 **Tabel 3.25** IKSP 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM
- 115 **Tabel 3.26** Perbandingan Antara Target dan Realisasi
- 116 **Tabel 3.27** Alokasi Anggaran Badan Litbang SDM di Akhir TA 2020
- 117 **Tabel 3.28** Pembagian Porsi Belanja Berdasarkan Sumber Dana (RM atau PNBPN)
- 119 **Tabel 3.29** Capaian Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020
- 122 **Tabel 3.30** Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2020



DAFTAR GAMBAR

- 9 **Gambar 1.1** Roadmap Literasi Digital 2021-2024
- 12 **Gambar 1.2** Fungsi BLSDM
- 13 **Gambar 1.3** Struktur Organisasi Badan Litbang SDM Pusat Berdasarkan Permen Kominfo No 6 Tahun 2018
- 15 **Gambar 1.4** Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo
- 17 **Gambar 1.5** Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo
- 18 **Gambar 1.6** Struktur Organisasi STMM Yogyakarta
- 19 **Gambar 1.7** Struktur Organisasi UPT BPPTIK
- 20 **Gambar 1.8** Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM (1)
- 21 **Gambar 1.9** Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM (2)
- 29 **Gambar 2.1** Cascading Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Kominfo Berdasarkan Renstra 2020-2024
- 30 **Gambar 2.2** Sasaran Pengembangan SDM Era Digital
- 34 **Gambar 2.3** Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Litbang SDM 2020-2024
- 35 **Gambar 2.4** Program Dukungan Manajemen
- 36 **Gambar 2.5** Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo 2020
- 39 **Gambar 2.6** Sasaran Program Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2020
- 43 **Gambar 2.7** Tujuan Program *Digital Talent Scholarship*
- 58 **Gambar 3.1** Hambatan Pemenuhan Kewajiban dan Komitmen Penyelenggara Pos
- 61 **Gambar 3.2** Tiga Bagian Besar Konsensus
- 84 **Gambar 3.3** Program *Digital Talent Scholarship*



DAFTAR GAMBAR

- 87 **Gambar 3.4** Rincian Peserta DTS dari Setiap Akademi
- 92 **Gambar 3.5** Pembaruan SIMONAS
- 96 **Gambar 3.6** Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020
- 98 **Gambar 3.7** Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2020
- 99 **Gambar 3.8** Mitra Kerja Sama DTS 2018-2020
- 115 **Gambar 3.9** Bobot Nilai SMART dan IKPA



DAFTAR LAMPIRAN

- 126 **Lampiran 1** Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
- 129 **Lampiran 2** Kinerja Realisasi Satuan Kerja/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM TA 2020

Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Badan Litbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika di akhir tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Litbang SDM dalam melaksanakan misinya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Pada tahun 2020 Badan Penelitian dan Pengembangan SDM telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Dari 9 (sembilan) IKSP yang telah ditetapkan, sebanyak 9 (sembilan) IKSP atau sekitar 100% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%).
2. IKSP yang pencapaiannya melebihi target dari yang ditetapkan (>100%) adalah :
 - 1) Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS).;
 - 3) Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy* yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.;
 - 4) Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis;
 - 5) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM;
 - 6) Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM;
 - 7) Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019;
 - 8) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN;
 - 9) Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi Badan Litbang SDM pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 271.407.492.196,- atau 89,04% dari alokasi anggaran Rp 304.801.530.000.

Dalam rangka terus mendorong terwujudnya kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, Badan Litbang SDM berusaha mengatasi dan mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholder Badan Litbang SDM dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Badan Litbang SDM.

BAB 1

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai institusi pemerintah yang diberi tugas dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, termasuk telematika dan penyiaran dalam hal ini menyadari dan mendukung upaya pemerintah terhadap terwujudnya masyarakat informasi berbasis ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai Knowledge Base Society. Pada pelaksanaannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program dan kegiatan terkait dengan satuan kerja yang dinaunginya.

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan unsur penunjang dengan perannya sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, serta sebagai pelaksana pengembangan SDM pada bidang yang sama. Melalui peran inilah, usulan terkait kebijakan maupun regulasi hingga pada evaluasi atas implementasi dari kebijakan tersebut dapat direkomendasikan pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menjalankan peran lainnya, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi untuk bidang komunikasi dan informatika. Sebagaimana peran yang dimaksud berupaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta pemahaman masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. Peningkatan literasi, pengetahuan, dan kompetensi masyarakat terkait bidang komunikasi dan informatika bagaimanapun sejalan dengan arah perkembangan masyarakat dalam era informasi saat ini terutama ketika memasuki era revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “*cyber physical system*”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.



Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “*cyber physical system*”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing*.

1. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (*interrelated connection*) untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan empat komponen, yaitu: perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia: Gowes (IoT untuk *bike sharing*), *eFishery* (IoT pemberi pakan ikan otomatis), Qlue (IoT untuk *smart city*), dan Hara (IoT untuk pangan dan pertanian)

2. *Big Data*

Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. *Big Data* dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia Layanan *Big Data* Indonesia, antara lain:

- a. *Sonar Platform*;
- b. *Paques Platform*;
- c. *Warung Data*;
- d. *Dattabot*.

3. *Artificial Intelligence (AI)*

AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi *chatbot* dan pengenalan wajah (*face recognition*) merupakan salah satu contoh penerapan AI.



4. *Cloud Computing*

Komputasi awan (*cloud computing*) adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*) menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen (*server*) melalui internet.

Contohnya, *hosting* situs web berbentuk peladen virtual. Ada tiga jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu:

- *Cloud Software as a Service (SaaS)*, layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan;
- *Cloud Platform as a Service (PaaS)*, layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi;
- *Infrastructure as a Service (IaaS)*, layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, dimana konsumen dapat memproses, penyimpanan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Produk-produk *cloud computing* di Indonesia:

- a. *K-Cloud*;
- b. *CloudKilat*;
- c. *Dewaweb*;
- d. *IDCloudHost*;
- e. *FreeCloud*.

5. *Addictive Manufacturing*

Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi *additive manufacturing* mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.²

² <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>



Menkominfo, Bapak Johnny G. Plate dalam siaran pers Jumat, 11 Desember 2020 menyatakan bahwa dalam menjajaki opsi baru solusi teknologi, Kementerian Kominfo kini menantikan kerja sama teknis yang nyata, terutama dalam hal infrastruktur digital dan pengembangan talenta digital. Beliau menambahkan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan warga negara dan pemulihan kondisi keuangan Indonesia. Termasuk dengan memberikan kesempatan kerja, mendorong substitusi impor, memberdayakan UMKM dan *credit unions*, mendorong investasi dan pasar saham, dan tentu saja, menjaga keseimbangan pembayaran.

Beliau turut menyampaikan optimisme sektor komunikasi dan informasi. Mengutip data terbaru BPS menggambarkan bahwa informatika dan komunikasi adalah satu-satunya sektor yang tetap tumbuh dua digit, di 10,83% di Triwulan ke-2 dan 10,61% di Triwulan ke-3 tahun 2020 y-o-y. Di saat hampir setiap sektor dilanda kontraksi ekonomi, informatika dan komunikasi adalah satu-satunya sektor yang tetap tumbuh dua digit.

Kenaikan yang konsisten tersebut menggambarkan betapa hal tersebut terbukti menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong percepatan Transformasi Digital di Indonesia.

Menkominfo juga mengingatkan kembali mandat dan tugas Kementerian Kominfo dalam mempercepat transformasi digital antara lain:

- 1) percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital;
- 2) pembuatan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis secara khusus sektor kominfo;
- 3) percepatan integrasi pusat data nasional dalam satu data nasional;
- 4) penyiapan sumber daya manusia atau talenta digital; serta
- 5) percepatan penyiapan hal-hal yang terkait regulasi, skema pembiayaan dan pendanaan.

Menurut Menteri Kominfo, pengembangan SDM tidak hanya untuk eksternal atau masyarakat luas, atau talenta digital andal dalam memasuki era transformasi digital menyongsong era teknologi 4.0. Hal yang perlu dipersiapkan juga SDM manusia di lingkungan Kementerian Kominfo yang nantinya memandu kebijakan dan menjadi *benchmark* talenta digital juga perlu di-*upgrade* dan *upskilling* keahlian dan kompetensinya. Badan Penelitian dan Pengembangan SDM memiliki peran menyiapkan atau talenta digital andal dalam memasuki era transformasi digital menyongsong era teknologi 4.0³

³ <https://teknologi.bisnis.com/read/20201211/84/1329765/percepatan-transformasi-digital-menkominfo-butuh-kolaborasi>



Untuk memaksimalkan potensi bangsa dalam ekonomi digital, Kementerian Kominfo tengah membangun infrastruktur digital yang tangguh melalui Agenda Transformasi Digital Nasional. Agenda itu terdiri dari empat pilar utama: (i) pembangunan infrastruktur digital secara masif; (ii) harmonisasi peraturan; (iii) penguatan ekosistem digital; dan (iv) pelatihan digital untuk sumber daya manusia. Strategi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat transformasi digital Indonesia, yang diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem digital yang kondusif untuk mendukung ekonomi digital yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia.⁴

Saat ini, Kementerian Kominfo berupaya menyiapkan dan mengembangkan talenta digital dengan berfokus pada aspek literasi dan pengembangan teknis kecakapan teknologi baru. Menurut Menteri Kominfo, literasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan rasa percaya akan pemanfaatan teknologi. Sedangkan, pengetahuan teknis dibutuhkan karena banyak pekerjaan yang diproyeksikan akan tergantikan dengan teknologi baru seiring pemanfaatannya yang semakin masif.

*Computer will take human jobs, but computer will also create another job for human.*⁵ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Hary Budiarto (saat itu menjabat Tenaga Ahli Kepala BPPT) pernah mengutarakan bahwa sebagian masyarakat menilai kecerdasan buatan menakutkan. Beliau memastikan bahwa kecerdasan buatan sebenarnya dibuat dan dikendalikan oleh manusia. Jadi tetap diperlukan peran manusia dalam urusan *Artificial Intelligence*. Kecerdasan buatan sudah masuk dalam strategi nasional (stranas). Di dalam stranas tersebut mencakup mengenai etika dan kebijakan pengembangan kecerdasan buatan, keamanan data pribadi, perlindungan serta pengembangan talenta di bidang kecerdasan artifisial.⁶

Pengembangan SDM dilakukan dengan merancang program-program untuk mendukung SDM Indonesia dan SDM Kominfo yang *digital minded*, punya kemampuan keterampilan digital melalui banyak program yang telah dijalankan, di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital bersama dengan Ditjen Aptika, Digital Talent Scholarship hingga Digital Leadership Academy.⁷

Program Digital Talent Scholarship berangkat dari pemikiran bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu 2015-2030, kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai 9 juta orang dengan kebutuhan rata-rata 600.000 orang per tahun.⁸ Apabila dikombinasikan dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia maka diperlukan perencanaan matang, serius, dan kerja keras luar biasa untuk menyiapkannya dengan fokus pada aspek literasi serta kecakapan teknis melalui program Digital Talent Scholarship serta Digital Leadership Academy.

⁴ https://kominfo.go.id/content/detail/31383/siaran-pers-no-164hmkominfo122020-tentang-percepat-pemulihan-ekonomi-lewat-transformasi-digital-menkominfo-dorong-kemitraan-multipihak/0/siaran_pers

⁵ <https://fsetu.id/2020/12/29/lantik-sekjen-dan-kepala-badan-litbang-sdm-menkominfo-tekanan-pengembangan-sdm-dan-talenta-digital/>

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qjcp70380/bppt-kecerdasan-buatan-tak-hilangkan-pekerjaan-manusia>

⁷ https://kominfo.go.id/content/detail/31898/siaran-pers-no-04hmkominfo012021-tentang-dorong-kerja-lebih-produktif-menkominfo-tekanan-enam-fokus-tahun-2021/0/siaran_pers

⁸ <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita-kepala-baru-semangat-baru-19-712>



Digital Talent Scholarship merupakan program prioritas Badan Litbang SDM yang telah dimulai sejak tahun 2018 yang berlanjut hingga tahun 2020 dan resmi menjadi bagian dari RPJMN dan Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024. Tujuan utama program ini adalah mengurangi kesenjangan kemampuan *digital* di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Sementara itu, Digital Leadership Academy dilaksanakan sejak tahun 2019. DLA merupakan bagian dari rangkaian *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang bekerja sama dengan GSM Association (GSMA) yang merupakan perkumpulan dari operator seluler seluruh dunia yang beranggotakan lebih dari 750 operator telekomunikasi dan hampir 400 perusahaan yang bergerak di ekosistem telekomunikasi meliputi produsen perangkat, perusahaan piranti lunak dan internet. Program ini merupakan program pengembangan talenta digital tingkat tinggi yang dikhususkan bagi *Senior-level Bureaucrats, Chief-Level Practitioner* dan akademisi. Semula, DLA juga telah matang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kegiatan DTS tahun 2020, namun batal dilaksanakan terkendala pandemi Covid19.

Kilas balik dari penyelenggaraan DLA tahun 2019, program pengembangan kapasitas tingkat tinggi untuk tataran pejabat pembuat kebijakan setingkat eselon 2 dan 3 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait tema digital ekonomi dan teknologi finansial serta memberikan eksposur ekosistem digital bagi para pembuat kebijakan di Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas fungsi pembuatan kebijakan bidang ekonomi digital dan teknologi finansial. Dalam pelaksanaannya, Badan Litbang SDM bekerjasama dengan Ant Financial, perusahaan teknologi di bawah Alibaba yang bergerak dalam bidang layanan jasa inklusi finansial. Dalam kerja sama ini, program DLA masuk dalam *10 x 1000 Tech for Inclusion Program Workshop* yang diselenggarakan oleh Ant Fin. Program ini melibatkan para pejabat Eselon II dan III dari internal Kementerian Kominfo dan 10 Kementerian lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait pembuatan kebijakan bidang ekonomi digital dan teknologi finansial yang dilaksanakan di kantor pusat Ant Financial Service, Z space, Hangzhou.



Pandemi Covid19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia dan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan banyak sektor bisnis terpuruk. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan tersebut disebutkan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Penerapan kebijakan PSBB (ketentuan dan istilah penyebutannya berbeda-beda dan menjadi diskresi di masing-masing wilayah) setidaknya mempengaruhi beberapa sektor besar penyumbang pendapatan pajak baik tingkat pusat maupun daerah, yakni: sektor pariwisata, sektor manufaktur, transportasi, perdagangan, konstruksi dan lain-lain.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 juga membuat transformasi digital menjadi keharusan. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Pemerintah bahkan berkomitmen mempercepat realisasi transformasi digital dari sebelumnya yang diagendakan 10 tahun menjadi 2-3 tahun. Tugas ini diamanahkan Presiden kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).⁹

Pandemi yang membatasi pergerakan dan pertemuan antar manusia “memaksa” kondisi yang semula terasa tidak terjangkau menjadi sebuah keniscayaan. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa rapat formal yang semula mengharuskan peserta bertemu muka untuk melakukan koordinasi, dapat dilaksanakan secara daring dengan aplikasi Zoom, Google Meet, sampai aplikasi produksi lokal yakni MeetingKita. Begitu juga dengan kegiatan pendidikan baik formal maupun informal. Kondisi “Kenormalan Baru” yang akrab disebut “New Normal” yang tidak direncanakan ini justru membuat banyak pihak yang semula tidak melek teknologi mau tidak mau harus beradaptasi dengan segera.

Untuk mengantisipasi tranformasi digital yang masif akibat pandemi Covid19, Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan menyampaikan pentingnya empat pilar literasi untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat di ruang digital serta mendukung transformasi digital, mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi. komunikasi yang tertuang pada Roadmap Literasi Digital 2021-2024, yaitu:

⁹ <https://investor.id/business/targetkan-transformasi-digital-dalam-3-tahun-kominfo-gagas-5-langkah>



Gambar 1.1
Roadmap Literasi Digital 2021-2024¹⁰



Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Ahmad M. Ramli menambahkan kesiapan talenta digital dapat diukur dengan delapan hal, yaitu *digital identity*, *digital use*, *digital safety*, *digital security*, *digital emotional intelligence*, *digital communication*, *digital literacy*, dan *rights*. Kolaborasi antara kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media yang kami sebut *penta helix* juga sangat penting untuk transformasi digital.¹¹

¹⁰ <https://aptika.kominfo.go.id/2021/01/empat-pilar-literasi-untuk-dukung-transformasi-digital/>

¹¹ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/selain-regulasi-perlu-siapkan-talenta-digital-untuk-hadapi-industri-4-0/>



Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM, Dedy Permadi juga menyatakan bahwa logika sederhananya, apabila disediakan infrastruktur internet maka secara bersamaan kami juga memastikan masyarakat siap menggunakan internet secara positif dan produktif. Kemenkominfo sudah mencanangkan satu kerangka pembangunan SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Tahap yang pertama adalah *basic digital skill* atau sering disebut literasi digital. *Intermediate digital skill* atau level teknis untuk kebutuhan talenta digital. Terakhir ada *advance digital skill* untuk *chief level* sebagai kepala pengambil kebijakan bidang digital.

Upaya transformasi digital yang tengah berlari di tengah pandemi Covid-19 turut dihadapkan pada kondisi anggaran yang harus dirombak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pandemi covid-19 mengharuskan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia untuk melakukan penanganan yang tepat dan terukur, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Karena itu perubahan kebijakan keuangan negara dan *refocusing* anggaran menjadi keharusan dalam menghadapi pandemi ini.

Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Beberapa kegiatan yang difokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19, antara lain seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat.

Dari hasil realokasi tersebut, anggaran akan ditujukan untuk beberapa K/L terkait teknis penanggulangan Covid-19, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan K/L Lainnya (untuk peralatan terkait penanggulangan Covid-19).

Refocusing anggaran sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditandatangani pada 20 Maret 2020 sebagai langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa berpengaruh besar pada penurunan anggaran dan target kinerja di Kementerian Kominfo dan turut berdampak pada pelaksanaan program prioritas yang melibatkan sumber daya manusia sebagai penerima manfaat.



Inpres ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. Dengan penyesuaian anggaran tersebut, beberapa program prioritas perlu disesuaikan pagu anggaran dan target output-nya.



TUGAS dan FUNGSI

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Litbang SDM menyelenggarakan fungsi :

Gambar 1.2
Fungsi BLSDM



PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

1

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

2



PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

3

PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

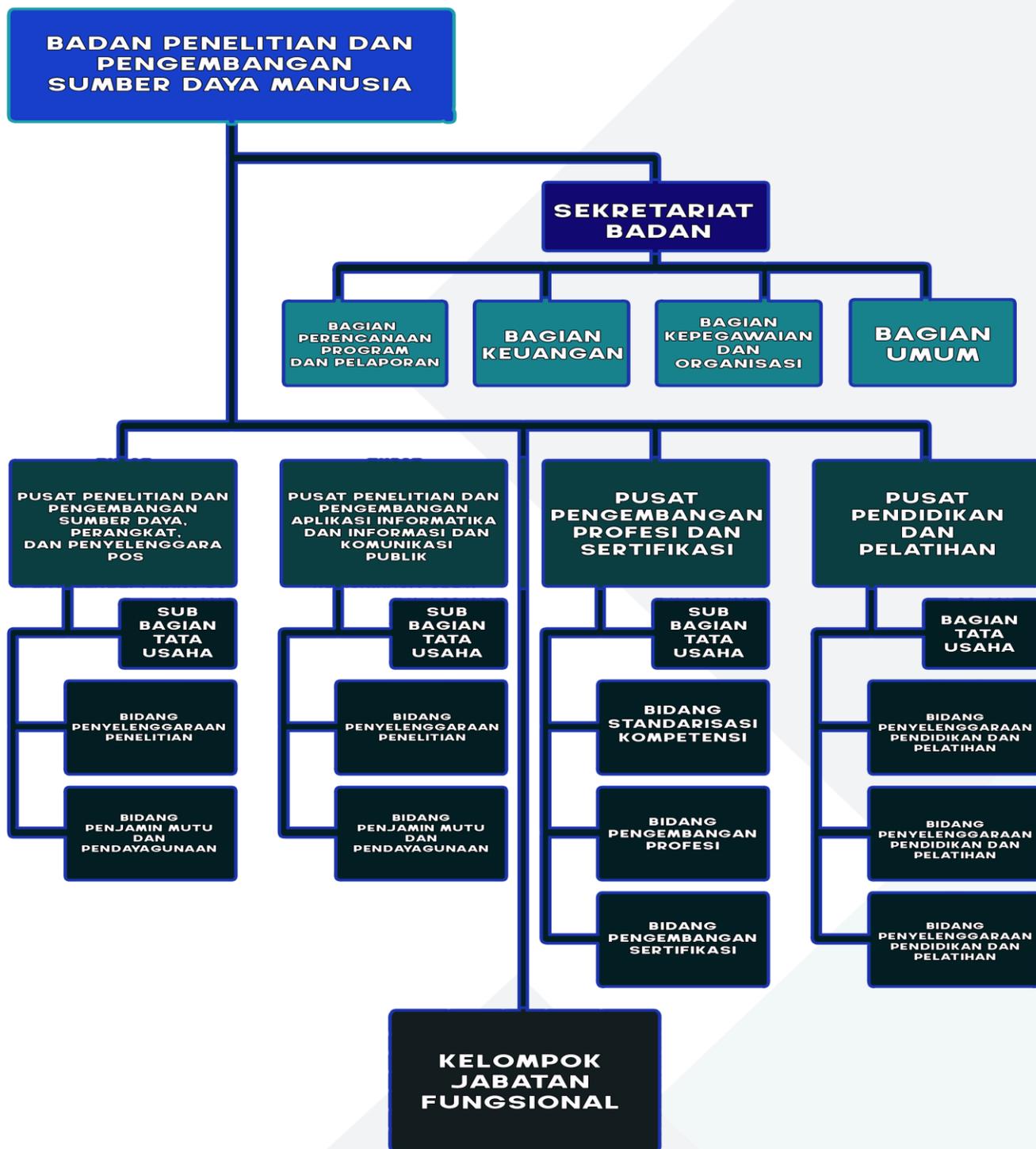
4



PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI.

5

Gambar 1.3
 Struktur Organisasi Badan Litbang SDM Pusat
 Berdasarkan Permen Kominfo No 6 Tahun 2018



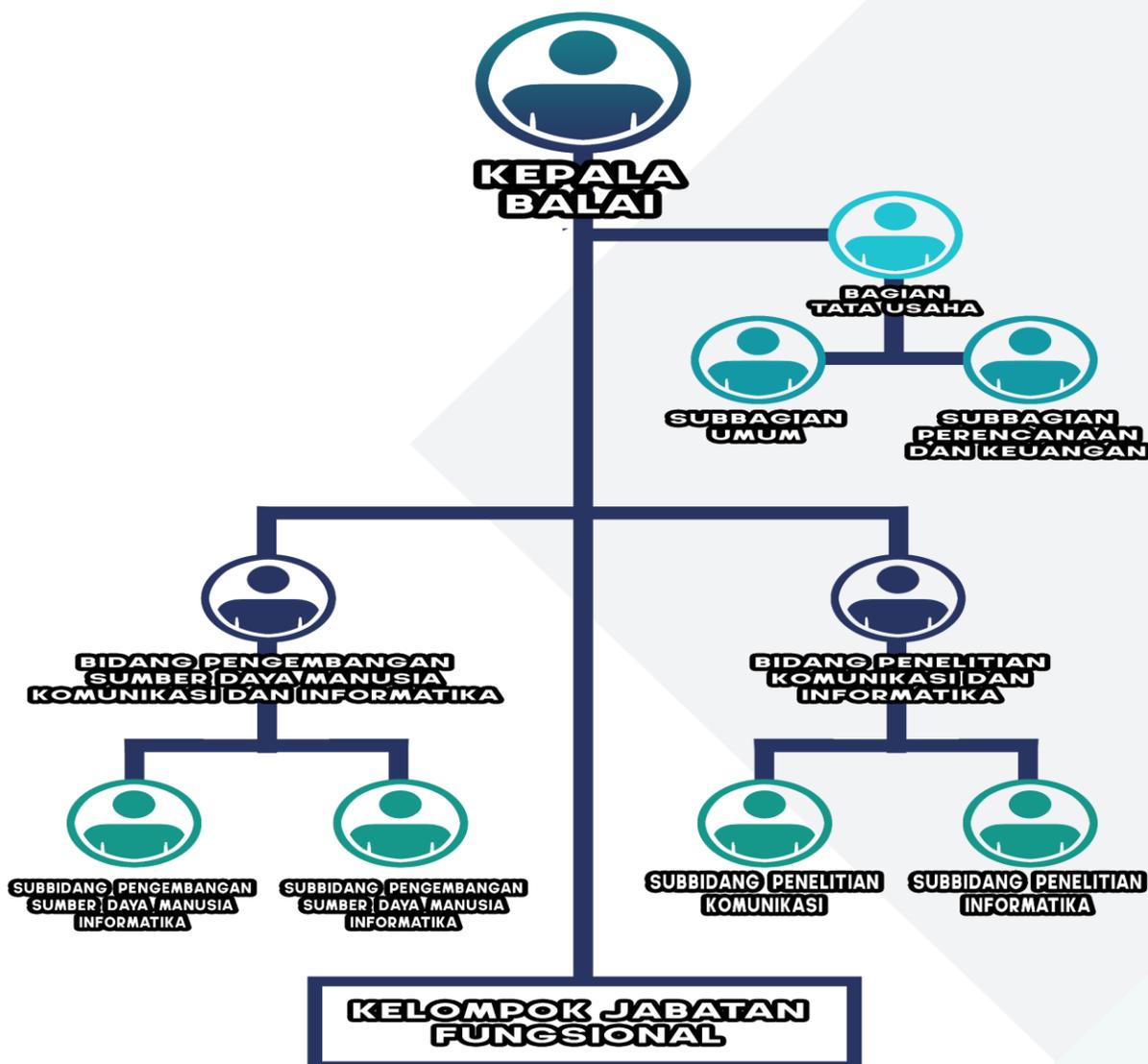
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Litbang SDM juga didukung oleh UPT di daerah yang ditetapkan dalam beberapa Peraturan Kementerian komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BBPSDMP dan BPSDMP Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) Medan dan Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPSDMP kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan. Susunan organisasi BBPSDMP Kominfo Medan terdiri dari : Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1
Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo

NO	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1	BPSDMP Kominfo Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACEH 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Kalimantan Barat 7. Kalimantan Utara
2	BPSDMP Kominfo Makasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tenggara 3. Nusa Tenggara Timur 4. Maluku 5. Maluku Utara 6. Papua 7. Papua Barat

Gambar 1.4
Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo

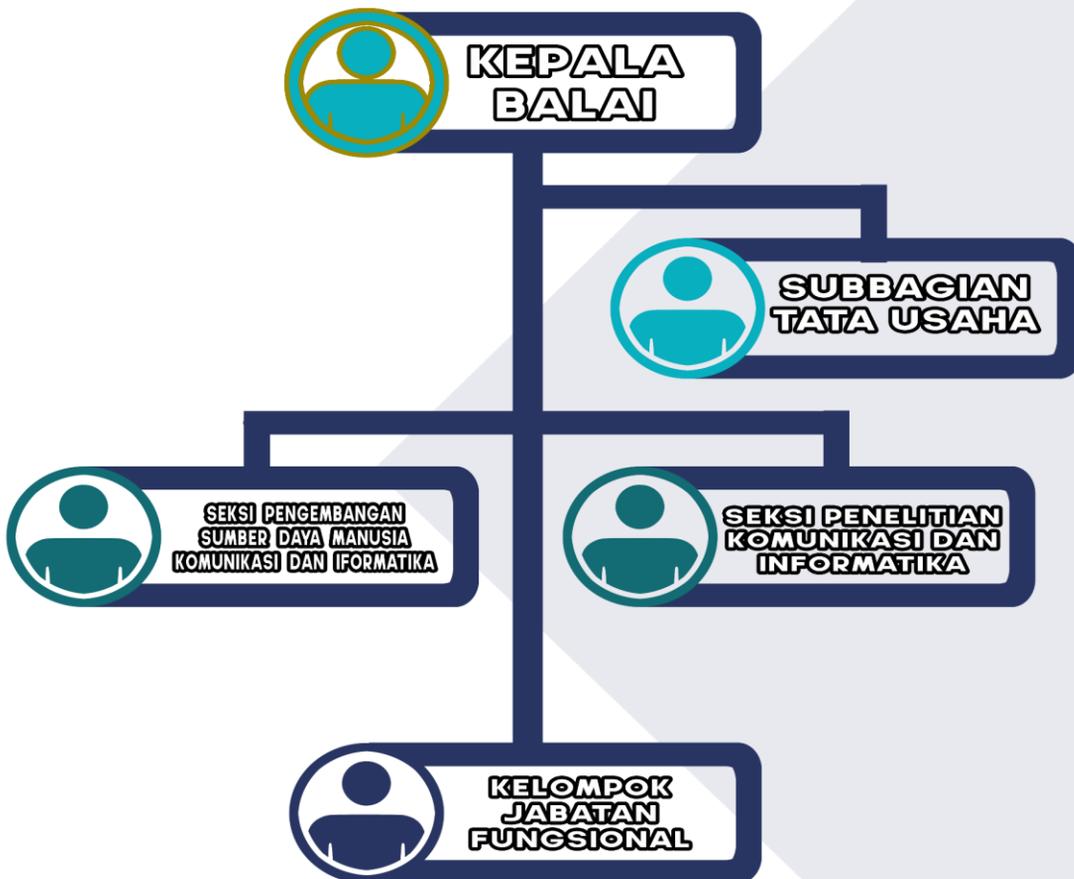


Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP kominfo) yang dipimpin oleh Kepala BPSDMP Kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja. Susunan organisasi BPSDMP Kominfo terdiri dari : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Seksi Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.2
Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo

NO	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1	BPSDMP Kominfo Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKI Jakarta 2. Sumatera Selatan 3. Bangka Belitung 4. Jambi
2	BPSDMP Kominfo Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawa Barat 2. Lampung 3. Banten 4. Bengkulu
3	BPSDMP Kominfo Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Bali
4	BPSDMP Kominfo Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawa Timur 2. NTB
5	BPSDMP Kominfo Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur
6	BPSDMP Kominfo Manado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 4. Sulawesi Barat

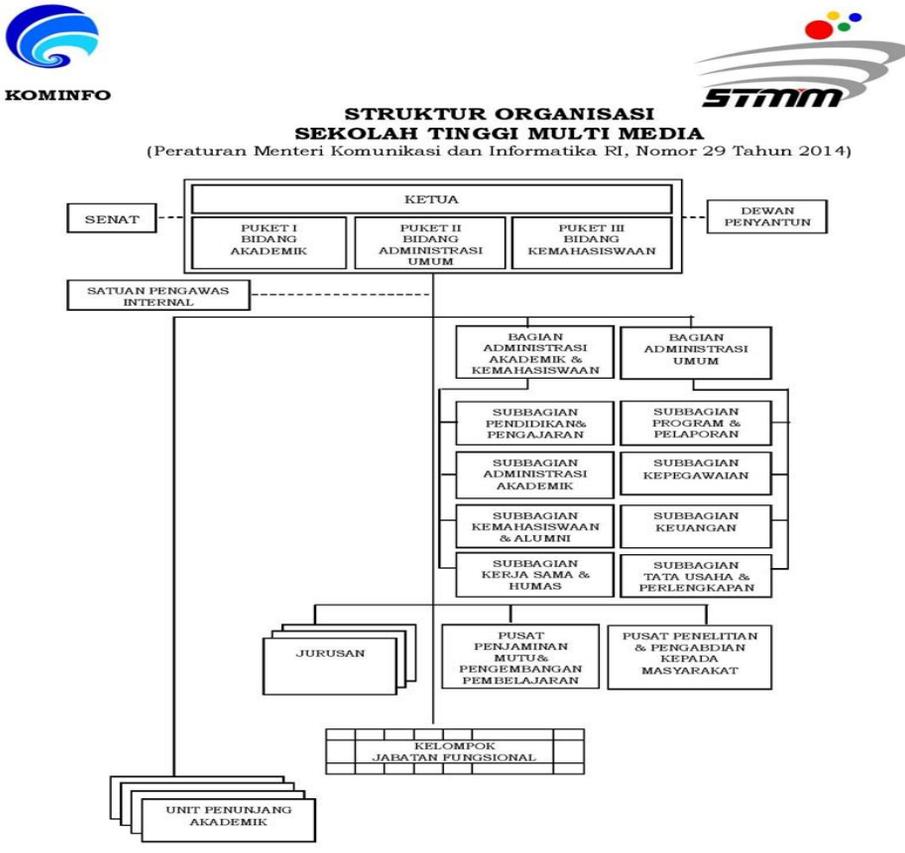
Gambar 1.5
Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo



2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (STMM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian STMM, maka dalam melaksanakan Perpres tersebut, Kemenkominfo menerbitkan Permenkominfo nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMM yang dipimpin oleh Ketua STMM (setingkat Eselon II) dan memiliki tugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi STMM terdiri dari: Ketua, Pembantu Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Intenal, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penunjang Akademik dan Kelompok Jabatan fungsional.

Gambar 1.6
Struktur Organisasi STMM Yogyakarta



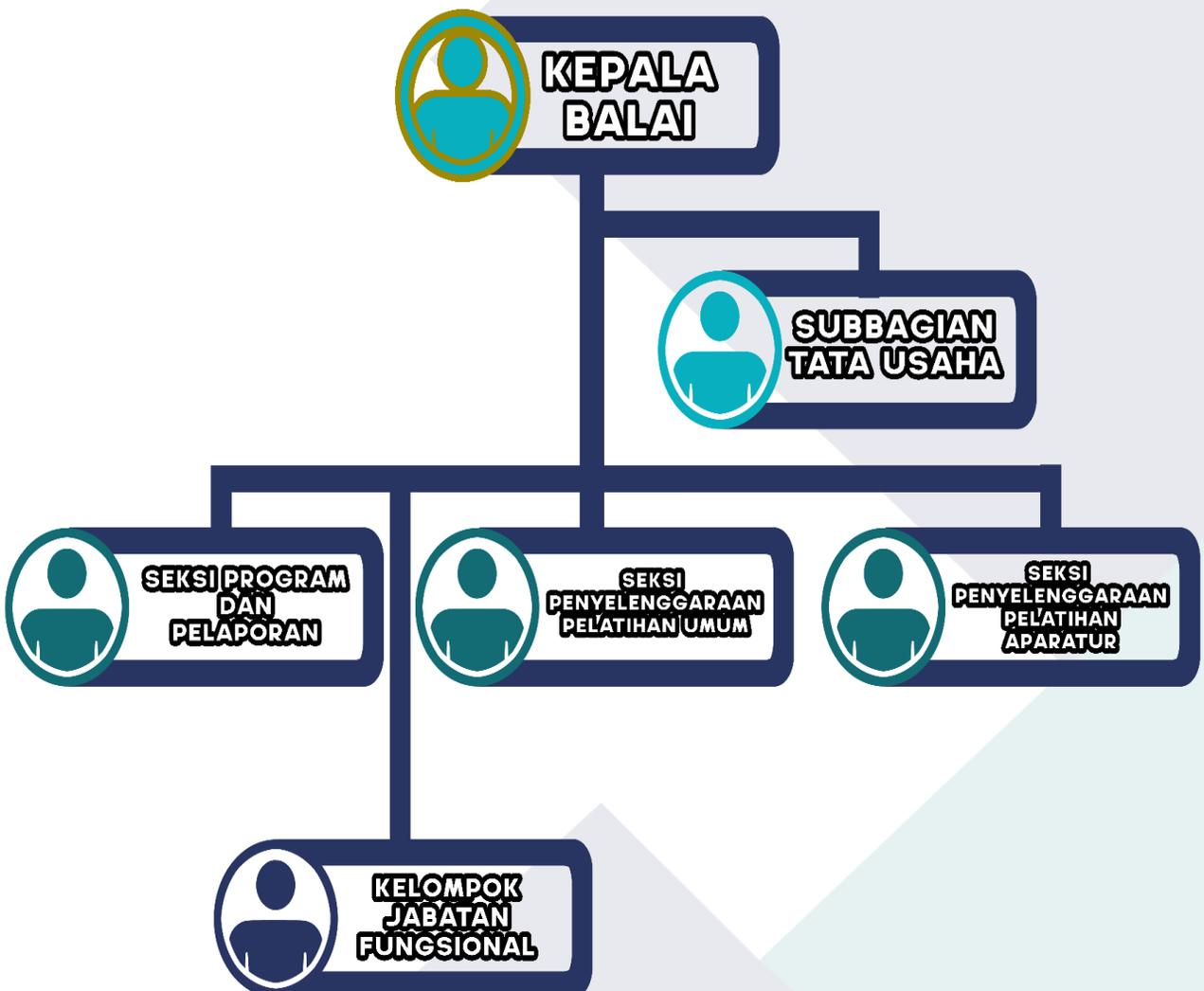
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

Berdasarkan Permenkominfo nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPTIK, sebagai salah satu UPT di lingkungan Badan Litbang SDM yang dipimpin oleh Kepala BPPTIK, memiliki tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BPPTIK juga memiliki tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M.PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan menyelenggarakan

pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Bidang TIK. Susunan organisasi BPPTIK terdiri dari: Subbagian Tata Usaha, Sesi Program dan Pelaporan, Seksi Penyelenggraan Pelatihan Umum, Seksi Penyelenggraan Pelatihan Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.7
Struktur Organisasi UPT BPPTIK



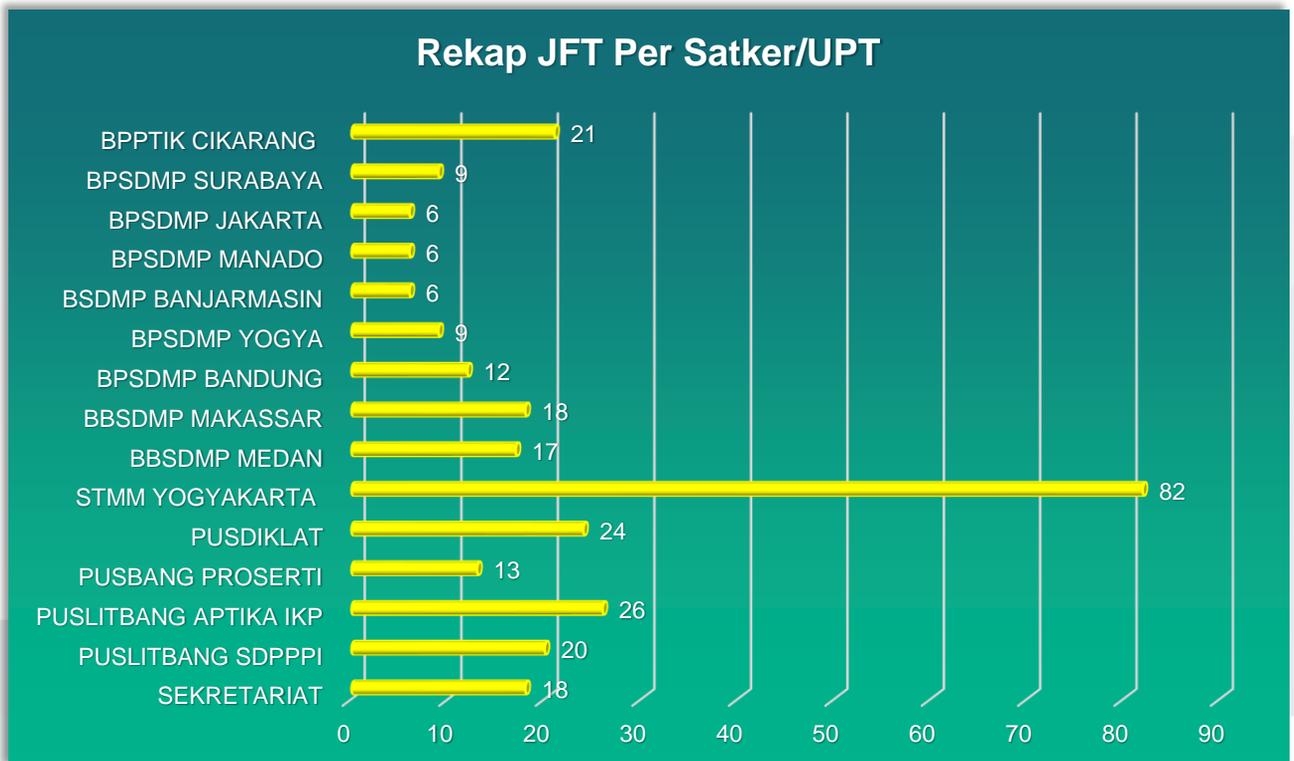


SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LITBANG SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang SDM didukung oleh 523 pegawai ASN dan 207 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dari 15 (lima belas) Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Pusat maupun daerah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon 3 dan 4 selain Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tercatat pelantikan pejabat structural menjadi pejabat fungsional tertentu melalui proses *inpassing* dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada Juni, Agustus, dan Oktober bagi 92 pejabat bersamaan dengan unit kerja lain. Saat ini, total Pejabat Fungsional Tertentu adalah 287 orang dengan sebaran sebagai berikut:

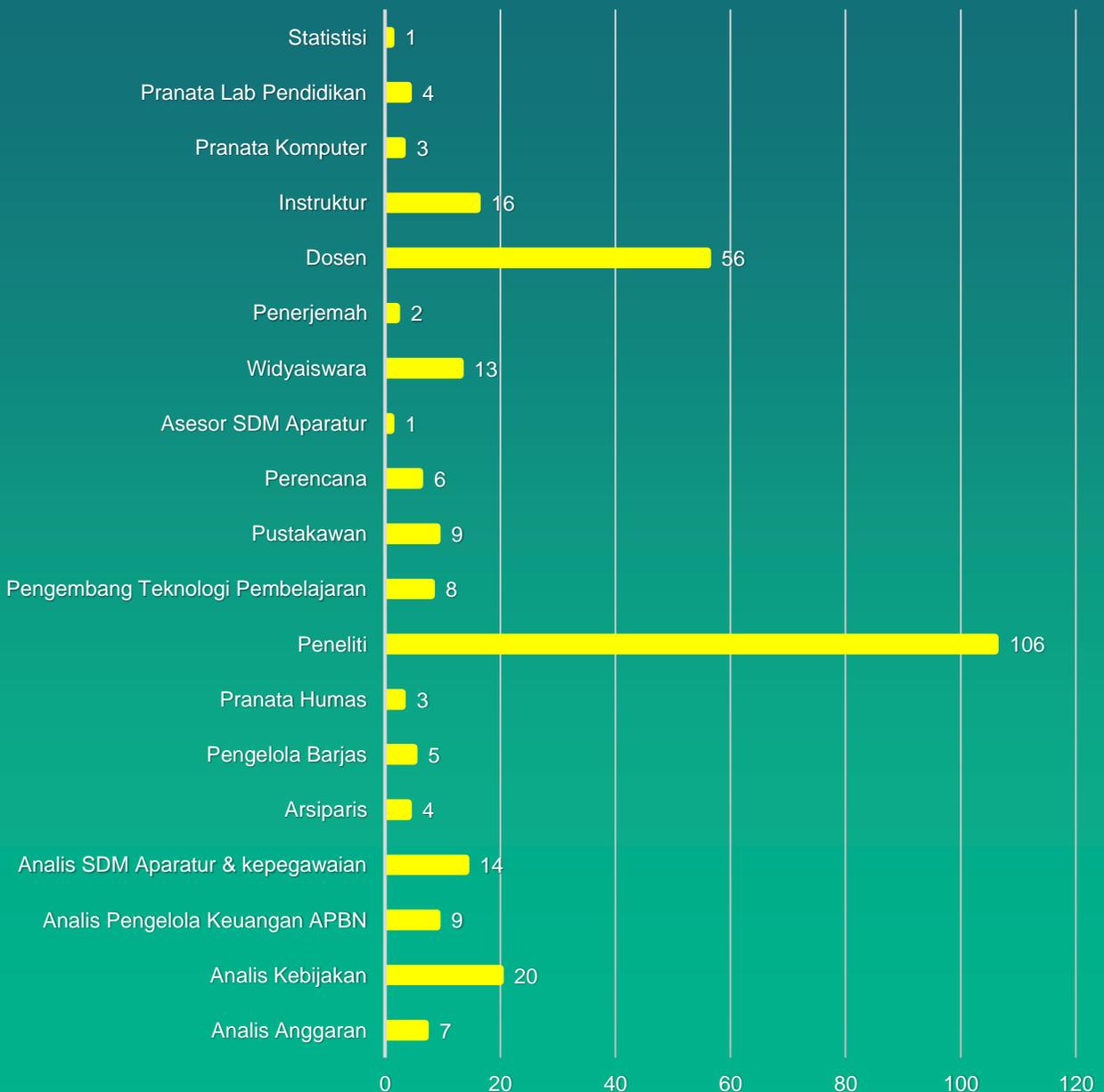
Gambar 1.8

Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM (1)



Gambar 1.9
Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM (2)

SEBARAN JFT DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG SDM



BAB 2

PERENCANAAN KERJA



Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan SDM mengacu pada RPJM Nasional tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Badan Litbang SDM mengambil peran penting pada 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS.06		Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.07	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	100	100	100	100	100
SS.07		Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital				
IKSS.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)*	205.000	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000
IKSS.02	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	45.520	72.500	72.500	72.500	72.500



SASARAN PROGRAM

Dalam mendukung 3 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas, Badan Litbang SDM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Program

Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)						
SP. 05	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK					
IKP.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill : a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	45.000	60.000	60.000	60.000	75.000
IKP.02	Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95

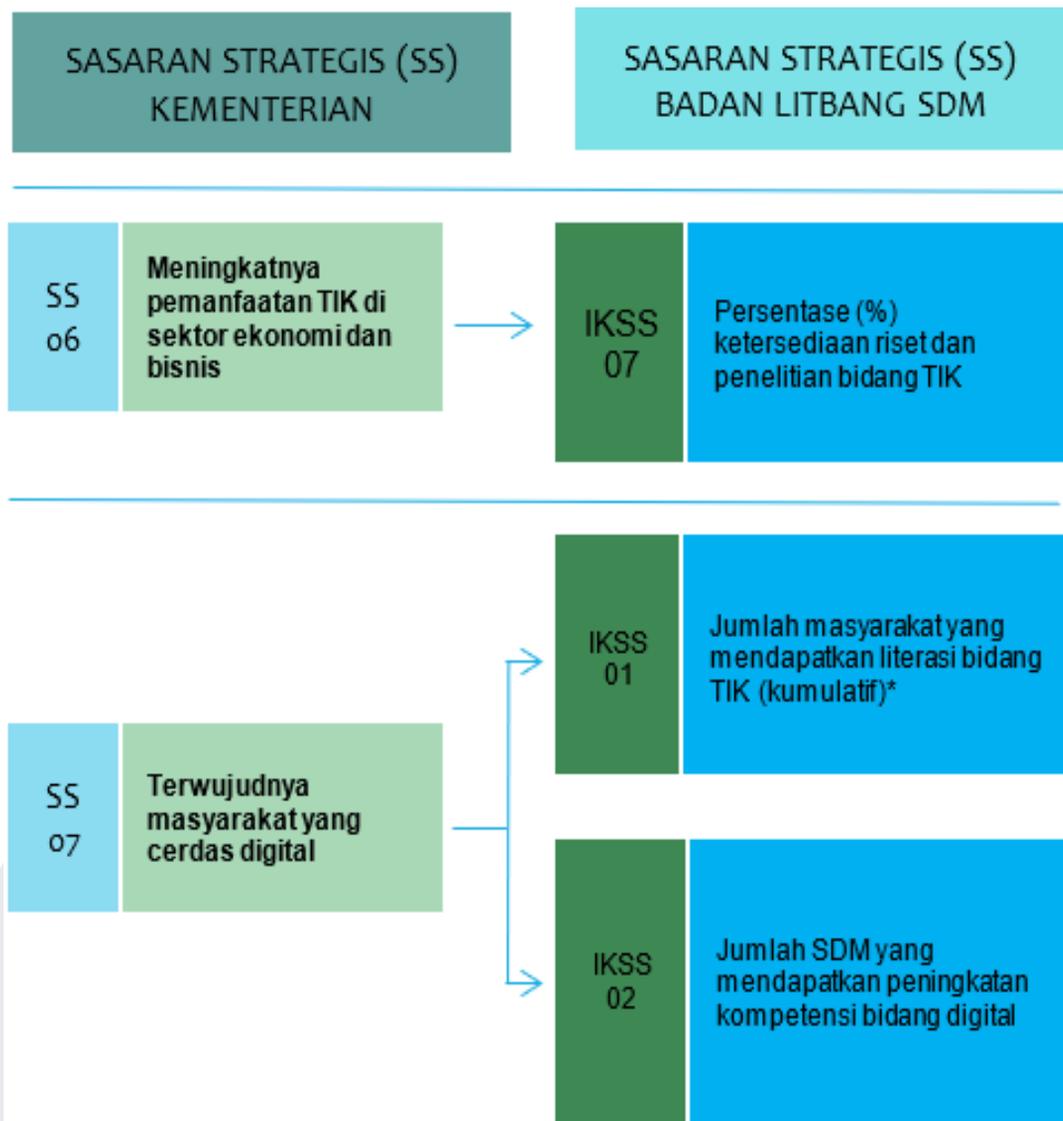
Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)						
SP. 05	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK					
IKP.03	Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	400	3.400	5.400	7.500	10.000
IKP.04	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif)	2.000	4.400	10.800	15.200	19.600

Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)						
SP. 06	Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK					
IKP.01	Persentase peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan balitbang	5	5	5	5	5
IKP.02	Persentase hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen						
SP. 1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola BLSDM yang bersih dan Efisien					
IKP.01	Nilai indeks Reformasi Birokrasi BLSDM	76,5	78	80	82	84
IKP.02	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BLSDM	67	68,5	70,5	72,5	75
IKP.03	Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BLSDM Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK	1	1	1	1	1

Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen						
SP. 1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola BLSDM yang bersih dan Efisien					
IKP.04	Nilai Kinerja Anggaran BLSDM	86	86	87	87	88
IKP.05	Nilai SPIP Balitbang SDM	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80
IKP.06	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BLSDM	-	3,71	3,74	3,75	3,8

Gambar 2.1
 Cascading Sasaran Strategis dan Target Kinerja
 Kementerian Kominfo Berdasarkan Renstra 2020-2024



ARAH KEBIJAKAN BALITBANG SDM TAHUN 2020-2024



Sesuai dengan salah satu arahan presiden dan agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kompetensi bidang TIK/digital menjadi sangat relevan, terlebih di dorong oleh agenda pembangunan nasional untuk pengembangan ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 serta penyelenggaraan *e-government*. Di samping itu, arah pembangunan nasional juga menekankan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan TIK. Walaupun pengembangan SDM dan edukasi bukan merupakan tanggung jawab utama Kemkominfo, peran Kemkominfo dalam memfasilitasi dan mengakselerasi peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM menjadi sangat penting terutama dalam mendukung transformasi digital untuk pengembangan ekonomi digital pada sektor fokus yang tertuang di dalam rencana strategis 2020 - 2024.

Gambar 2.2
Sasaran Pengembangan SDM Era Digital



Arah kebijakan terkait pengembangan SDM bidang TIK/digital dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mendukung penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui pengembangan kompetensi untuk angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda termasuk yang ada di kawasan prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi terutama ekonomi digital pada sektor fokus serta peningkatan kapasitas SDM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
2. Penguatan kelembagaan termasuk pengembangan kompetensi ASN, pembentukan ekosistem, dan standar kompetensi jabatan ASN khususnya dalam bidang TIK/digital serta manajemen talentanya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government* yang dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Alih kompetensi melalui *reskilling*, *upskilling* dan *newskilling* khususnya bagi tenaga kerja bidang TIK/digital yang terdampak automasi sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
4. Mengurangi pengangguran bidang kominfo melalui peningkatan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak serta peran industri/swasta dalam pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi SDM untuk sektor unggulan dan dapat menyediakan pelatihan berlandaskan standar kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang TIK/digital dan literasi digital yang akan terfokus pada segmen prioritas, strategi yang akan dijalankan meliputi:

1. Peningkatan kompetensi dan kemampuan digital untuk tenaga kerja Penguatan peran Kemkominfo sebagai fasilitator dan akselerator pengembangan kompetensi SDM bidang TIK/digital.
 - a. Peningkatan kualitas SKKNI bidang TIK/Digital yang "*future-proof*" melalui kolaborasi intensif dengan pelaku industri dalam pembaharuan SKKNI, serta penyusunan peta okupasi umum dan industry-specific
 - b. Peningkatan kompetensi dan kemampuan tenaga kerja bidang TIK/Digital dengan memanfaatkan program *Digital Talent Scholarship* untuk 300.000 peserta pelatihan.
 - c. Pemberian beasiswa S2/S3 bidang digital kepada 1.000 penerima
 - d. Pengenalan TIK bagi masyarakat untuk memberika pengetahuan dasar penggunaan dan pemanfaatan TIK.
 - e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang TIK/Digital.

- 
2. Peningkatan Kompetensi dan kemampuan ASN dan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika
 3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo melalui Sekolah Tinggi Multi Media;
 - b. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
 - c. Peningkatan sumber daya penyelenggaraan pendidikan tinggi

Selain pengembangan SDM, Badan Litbang SDM juga mempunyai tugas fungsi terkait dengan penelitian dan pengembangan bidang kominfo. Dalam rangka mendukung Presiden untuk mengelola kebijakan dan program bidang komunikasi dan informatika, Kemenkominfo perlu merumuskan program dan kebijakan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang didasari oleh hasil riset dan penelitian bidang TIK, baik yang berasal dari lingkungan internal Kemenkominfo maupun dari lingkungan eksternal. Kualitas riset dan penelitian TIK dipengaruhi antara lain oleh kualitas kelembagaan dan kualitas peneliti sebagai sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada renstra ini, peningkatan kualitas kualitas atas kedua aspek penting ini akan terus didorong. yang didasari oleh hasil riset dan penelitian bidang TIK, baik yang berasal dari lingkungan internal Kemenkominfo maupun dari lingkungan eksternal. Kualitas riset dan penelitian TIK dipengaruhi antara lain oleh kualitas kelembagaan dan kualitas peneliti sebagai sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada renstra ini, peningkatan kualitas kualitas atas kedua aspek penting ini akan terus didorong. Kualitas kelembagaan dicapai melalui target pengakuan standar (akreditasi) lembaga riset yang dikeluarkan oleh Kemenristek/BRIN, yang dilanjutkan dengan target berbagai kerjasama penelitian dan insentif riset dari lembaga eksternal.

Sementara kualitas peneliti dapat terukur melalui publikasi-publikasi ilmiah, khususnya yang bereputasi internasional sehingga dapat berkontribusi pula dalam meningkatkan posisi Indonesia di kancah global. Dengan demikian, peningkatan kualitas kelembagaan dan kualitas SDM diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas output riset dan penelitian TIK. Untuk menciptakan hasil riset dan penelitian bidang TIK dari lingkungan internal Kementerian Kominfo yang kualitasnya semakin baik dan layak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan, diperlukan peningkatan kualitas riset dan penelitian bidang TIK yang akan dicapai langkah strategis antara lain:

1. Peningkatan kualitas penelitian, melalui :
 - a. Pemanfaatan saluran kolaborasi intensif antara lembaga penelitian dengan satuan kerja terkait untuk merumuskan dan mendiskusikan kebutuhan dan perkembangan proses penelitian.
 - b. Pelibatan SDM penelitian dalam pekerjaan sehari-hari di satuan kerja kementerian yang terkait dengan topik penelitian.
 - Kajian terkait Penggunaan TIK di Masyarakat untuk peningkatan sosial, budaya, dan ekonomi.
 - Kajian bidang telekomunikasi dan digitalisasi.
 - c. Revitalisasi pengelolaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan.
 - d. Optimalisasi penatakelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penelitian, melalui :
 - a. Pengikutsertaan SDM penelitian dalam program pelatihan dan/atau pendidikan formal lanjutan.
 - b. Pemberian kesempatan dan fasilitasi secara optimal terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi SDM penelitian.
3. Peningkatan kualitas lembaga penelitian
 - a. Peningkatan status akreditasi lembaga penelitian hingga menjadi lembaga penelitian dan pengembangan tingkat dunia.
 - b. Perlengkapan sarana dan prasarana pendukung penelitian serta bahan dan peralatan penelitian.
 - c. Pengembangan jaringan (*networking*) dan kerja sama penelitian dengan lembaga lain.
 - d. Intensifikasi publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.
 - e. Penyediaan layanan administrasi internal yang terdigitalisasi.

Untuk periode 2020-2024, penyusunan riset dan penelitian bidang TIK akan disusun untuk mendukung beberapa fokus kebijakan dan program Kemenkominfo:

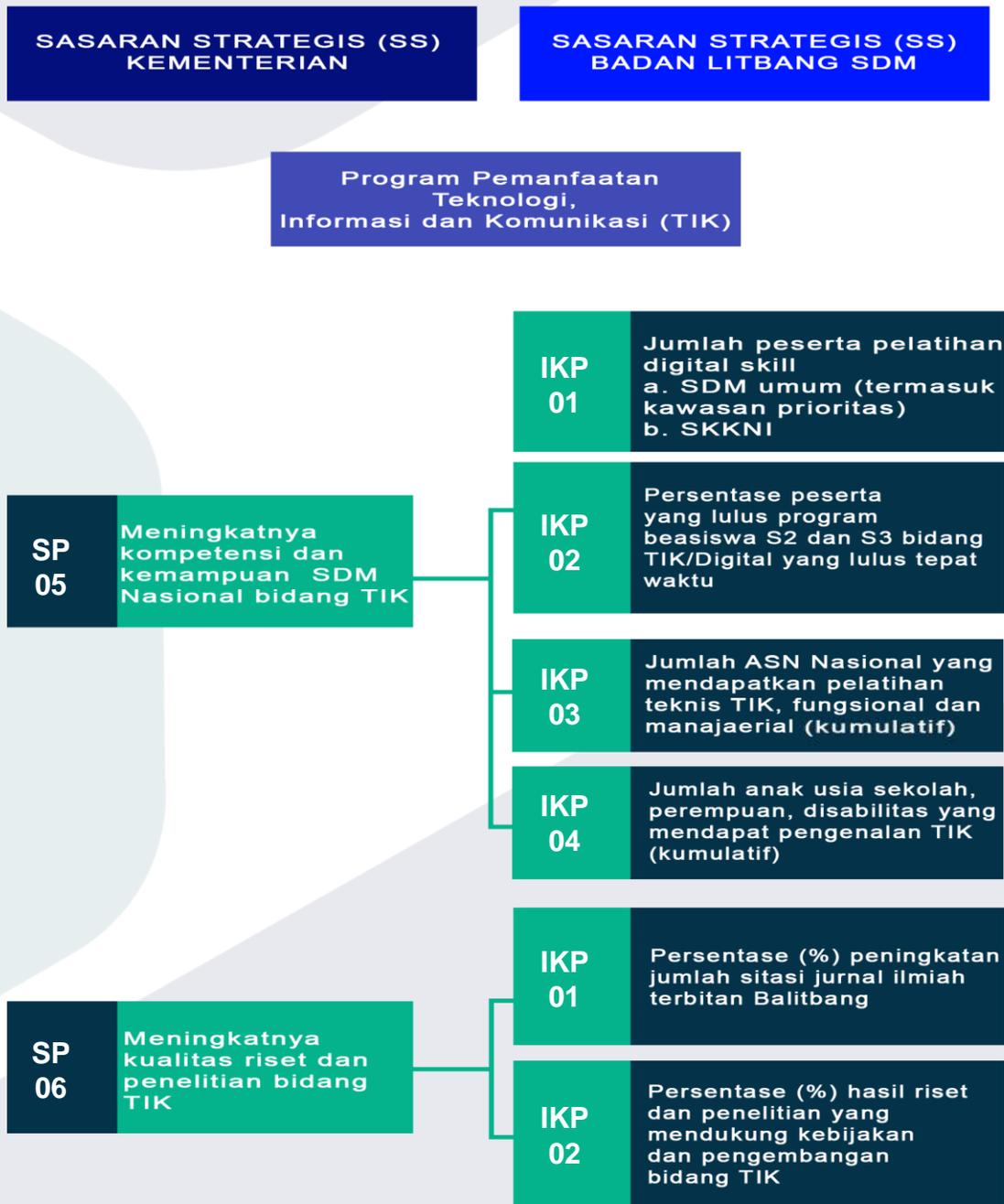
- Kajian terkait big data pemerintah
- Kajian bidang komunikasi publik pemerintah

INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Sasaran Program tersebut diatas dirumuskan indikator kinerja utama seperti di bawah ini :

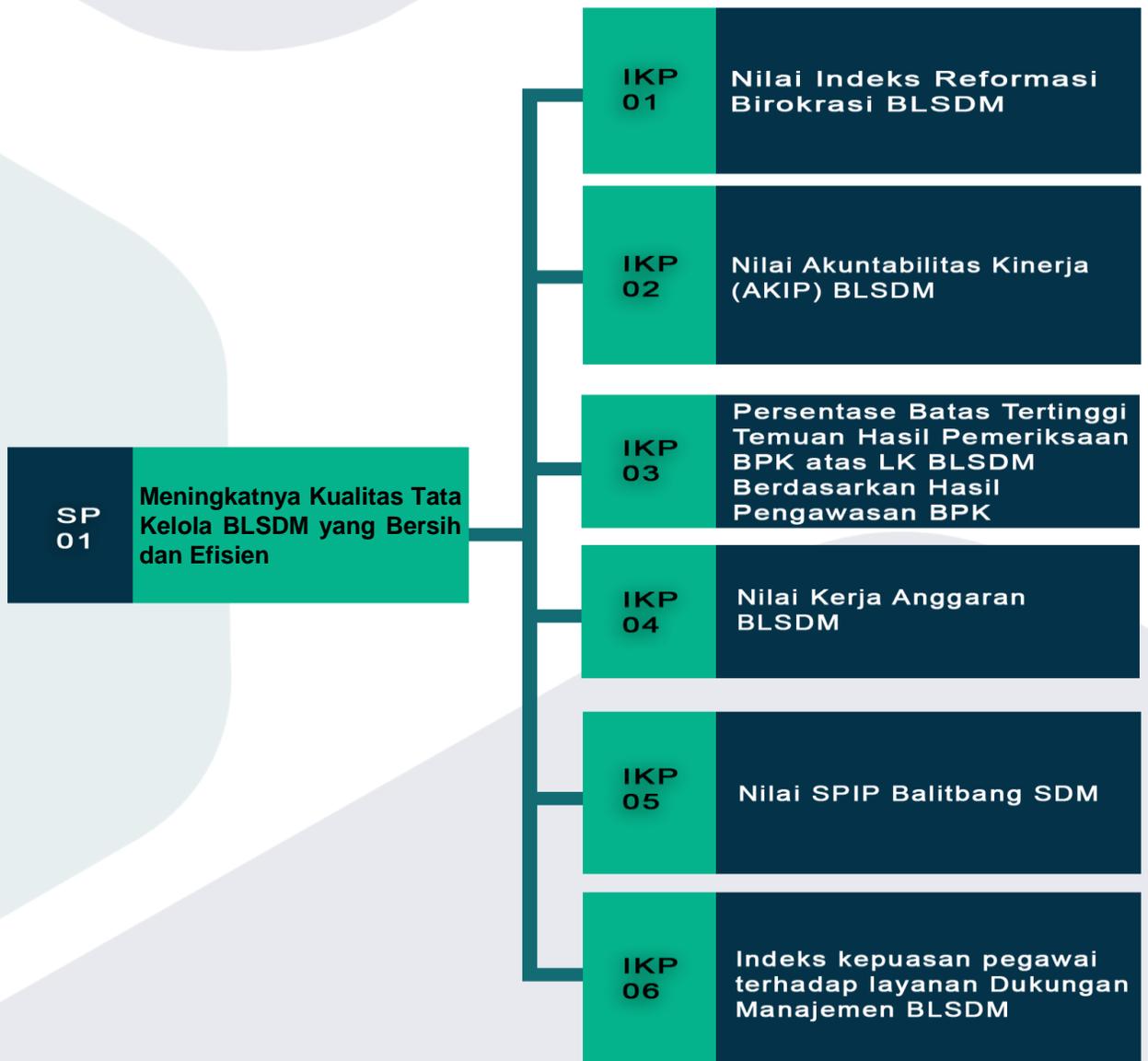
Gambar 2.3

Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Litbang SDM 2020-2024



Gambar 2.4
Program Dukungan Manajemen

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN



PERJANJIAN KINERJA

Untuk menjalankan Rencana Strategis, Kementerian menyusun Perjanjian Kinerja yang bersifat tahunan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis 5 Tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020, secara rinci adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo 2020



Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kementerian KOMINFO Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Percepatan Layanan Internet Bagi Masyarakat dan Layanan Publik dalam Rangka Transformasi Digital	1. Jumlah Akumulasi Desa/Kelurahan yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi	1.606 Desa/Kelurahan
		2. Jumlah Akumulasi Lokasi Layanan Internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi	8.400 Lokasi
		3. Jumlah Solusi Ekosistem Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Masyarakat Melalui Pemanfaatan Infrastruktur dan Penguatan Ekosistem di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI).	20 Solusi
		4. Jumlah Akumulasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Layanan <i>Broadband</i> Regional.	30 MHz
2.	Peningkatan Pemanfaatan TIK dalam Rangka Transformasi Digital.	1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengukuran QoS/QoE Penyelenggara Telekomunikasi.	60 Kab/Kota
		2. Jumlah <i>Startup Digital</i> Aktif.	10 <i>Startup Digital</i> Aktif
3.	Peningkatan Ketersediaan SDM Talenta Digital dalam Rangka Transformasi Digital	1. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi & Dapat Diserap Industri.	20%
		2. Jumlah Peserta (Masyarakat dan ASN) yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Pelatihan dan Sertifikasi dalam Program <i>Digital Talent Scholarship (DTS)</i> .	45.000 Peserta
		3. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK.	205.000 Orang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	1. Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Prioritas Pemerintah.	120 Juta Penduduk Usia Produktif
		2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah.	70%
5.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo	1. Nilai Reformasi Birokasi (RB) Kementerian Kominfo	76.5
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo.	67
		3. Opini atas Laporan Keuangan	WTP

Apabila diturunkan dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, maka Badan Litbang SDM mendukung Sasaran Strategis 3, “Peningkatan Ketersediaan SDM Talenta Digital dalam Rangka Transformasi Digital” dengan Indikator Kinerja Menteri 3.1., “Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy* yang Tersertifikasi & Dapat Diserap Industri.” dan 3.2., “Jumlah Peserta (Masyarakat dan ASN) yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Pelatihan dan Sertifikasi dalam Program *Digital Talent Scholarship (DTS)*.”. Dari Renstra Kementerian tersebut, dilakukan *cascading* menjadi Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji kinerja Badan Litbang SDM yang jelas dan terukur selama tahun 2020 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 merupakan implementasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Kementerian.

Tujuan perjanjian kinerja ini adalah untuk menjadi tolak ukur kinerja Badan Litbang SDM sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan serta sanksi atau *punishment*.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

Gambar 2.6
Sasaran Program
Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2020



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	60%
2.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS)	45.000
		2. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM.	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	76,5
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	67
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019	1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%
		5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM	86

Untuk mencapai target kinerja Badan Litbang SDM tahun 2020, rencana kerja dilakukan melalui 9 (Sembilan) program/kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM diharapkan dapat memberikan dukungan dan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

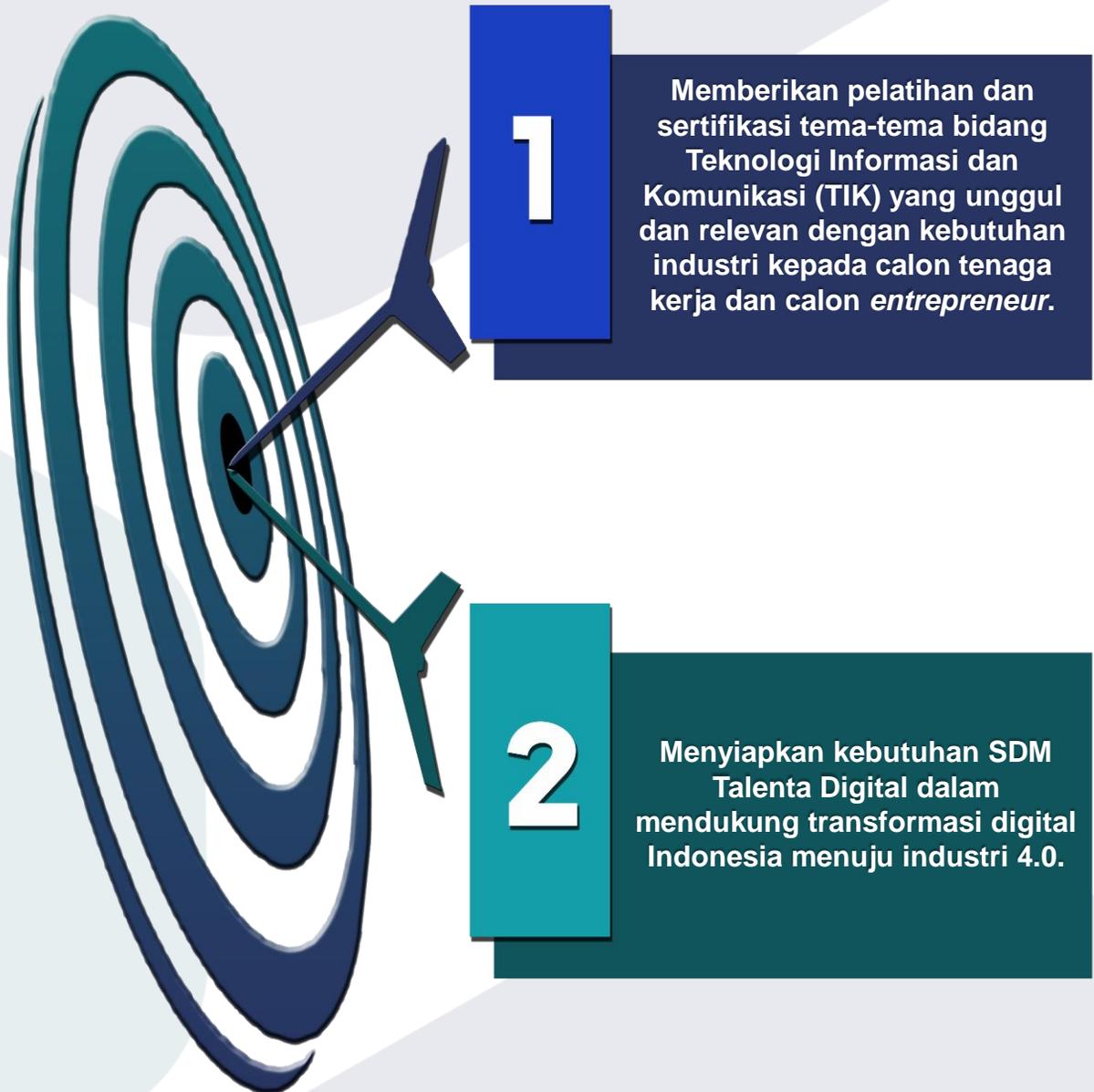
Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya kajian/penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penelitian jangka panjang, penelitian jangka pendek dan *policy brief*.

2. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS).

Pembangunan ekosistem TIK untuk menuju Transformasi Digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan Sabang hingga Merauke. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tidak optimal apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan atau memanfaatkan disrupsi teknologi yang ada terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pelatihan dan/atau sertifikasi DTS hadir sebagai lompatan yang efektif untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki tanah air dengan membekali angkatan kerja muda dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan keahlian spesifik di bidang TIK untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Tujuan Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) adalah:

Gambar 2.7
Tujuan Program *Digital Talent Scholarship*



3. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate* & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri

Jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan tinggi bermunculan, sementara jenis pekerjaan repetitif dan administratif mengalami penurunan yang signifikan. Banyak juga jenis pekerjaan lama yang bertahan, namun menuntut keterampilan yang kekinian. Ahli-ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan semakin banyak dicari seiring dengan masifnya digitalisasi. Akibatnya, timbul kesenjangan yang besar dalam hal *supply* dan *demand* talenta digital yang saat ini terjadi hampir di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah sejak tahun 2020 menjadikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas nasional. Program *Digital Talent Scholarship* merupakan program pengembangan SDM bidang TIK yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Target grup utama program ini adalah alumni SMK dan perguruan tinggi yang belum bekerja atau siswa dan mahasiswa yang segera lulus.

Tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan calon tenaga kerja bidang TIK yang lebih siap dan lebih sesuai dengan kebutuhan industri sehingga dapat mempersingkat masa tunggu mereka untuk memasuki dunia kerja.

4. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 70 ayat 1 dan 2, bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi tersebut melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus dan Penataran. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Diklat yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- a. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air.
- b. Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
- c. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang manajerial, teknis, dan fungsional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah realisasi peserta.

5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM

Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Litbang SDM diantaranya melalui pengawasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Litbang SDM.

Tujuan kegiatan ini adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Badan Litbang SDM.

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM

Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM melalui penjaminan kualitas dan penilaian mandiri atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Litbang SDM.

Tujuan kegiatan ini adalah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan konsep *good governance*.

7. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019.

Melihat temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 kemudian dibandingkan total realisasi anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk sebagai alat kontrol untuk memantau prosentase temuan terhadap total nilai anggaran. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi patokan seberapa besar kepatuhan, kepatutan, dan ketaatan administrasi yang diterapkan di lingkungan Badan Litbang SDM.

8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN.

Penyelesaian terhadap tindak lanjut rekomendasi di Badan Litbang SDM dari hasil pengawasan BPK dan Inspektorat di tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPK dan Inspektorat baik di tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

9. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM

Bobot variable Penilaian Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif TA 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2019, yakni:

- a. Bobot nilai evaluasi kinerja anggaran (nilai tercantum pada aplikasi SMART DJA) = 60%

Nilai evaluasi kinerja anggaran ditampilkan pada *dashboard* aplikasi *web based* SMART DJA. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas:

- a. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

Variabel yang diukur:

- a) Capaian keluaran → membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Program dengan target indikator Keluaran (Output) Program.
- b) Penyerapan anggaran → membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
- c) Efisiensi → membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- d) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan → memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

- b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.

Variabel yang diukur:

- a) Capaian Sasaran Strategis K/L untuk Kinerja Anggaran tingkat K/L dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan target indikator Sasaran Strategis K/L.
- b) Capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.

- c. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Kualitas informasi Kinerja Anggaran meliputi:
- a) Ketersediaan rumusan informasi Kinerja;
 - b) Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
 - c) Kejelasan rumusan informasi Kinerja;
 - d) Relevansi rumusan informasi Kinerja dengan rumusan informasi Kinerja yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
 - e) keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.
- b. Bobot nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (nilai tercantum pada sistem informasi yang disediakan Dirjen Perbendaharaan/IKPA) = 40%.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai tersebut dapat dilihat secara parsial setiap bulan pada menu MonevPA aplikasi web based OMSPAN DJPb yang dapat diakses pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#>.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin ketercapaian keluaran/output (output delivery) kelancaran pelaksanaan anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM), mendukung manajemen kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D), dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani bulan Juni 2020 merupakan hasil revisi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani bulan Januari 2020. Revisi tersebut menyesuaikan kebijakan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid19. Berikut perbedaan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja versi Januari dan Juni 2020:

Tabel 2.5
Target Perjanjian Kinerja Versi Januari dan Juni 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET PK Januari	TARGET PK Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	60%	60%
2.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS)	60.000	45.000
		2. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%	20%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET PK Januari	TARGET PK Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	76,5	76,5
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	67	67
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019	1%	1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%
		5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM	94	86

Dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang targetnya mengalami revisi adalah pada IKSP Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) dan Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Litbang SDM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	60%	100%	166,67%
2.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS)	45.000	58.116	129,15%
		2. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%	33,7%	168,5%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%	95,5%	106,11%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	76,5	91,71	120,67%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	67	67,20	100,3%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019	1%	0.013	100%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya a: 30%	a. Tahun berjalan: 100% b. Tahun sebelumnya a: 30%	100%
		5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM	86	94,02	109,33%

SP.1 DIMANFAATKANNYA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu didukung oleh indikator kinerja sasaran program, yaitu sebagai berikut:

IKSP 1.1. Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.2

IKSP 1.1. Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika

SP.1 Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.				
Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Capaian	%
1	Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	60%	100%	166,67%

Pada tahun anggaran 2020, Badan Litbang SDM menghasilkan 6 (enam) Penelitian dari target semula 10 (sepuluh) Penelitian. *Refocusing* anggaran terkait Berikut judul dan simpulan dari *Executive Summary* Penelitian dimaksud:

1. Kebijakan Penomoran *Internet of Things* dan *Machine to Machine Communications* pada Jaringan Seluler Di Indonesia

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan penomoran perangkat IoT/M2M di dalam upaya mengantisipasi perkembangan IoT/M2M di masa mendatang. Studi fokus pada penomoran IoT/M2M pada jaringan seluler dengan sistem penomoran berbasis rekomendasi ITU seperti yang digunakan saat ini. Analisis dilakukan dengan *fuzzy-analytical hierarchical process* (F-AHP) dan kuantitatif deskriptif. Hasil ekstrapolasi menunjukkan dengan asumsi CAGR 18%-28%, kapasitas sistem penomoran seluler saat ini masih sangat mencukupi kebutuhan sampai tahun 2030. Hasil analisis AHP menemukan perlunya aturan yang berbeda dalam hal struktur, jumlah digit, dan prefiks antara sistem penomoran IoT/M2M dengan penomoran konvensional, perlunya melakukan migrasi terhadap nomor-nomor IoT/M2M yang telah dialokasikan jika tidak sesuai ketentuan, dan perlunya peningkatan persyaratan nomor aktif untuk setiap permohonan NDC tambahan.

Hasil analisis kuantitatif deskriptif menunjukkan mayoritas responden menolak penggunaan penomoran *extra-territorial* dan penomoran global. Sebagian besar responden juga menganggap aturan registrasi nomor seluler saat ini masih relevan untuk diterapkan pada IoT/M2M. Namun untuk meminimalisasi penyalahgunaan, aturan registrasi dapat menambahkan biometrik untuk proses verifikasi.

Studi dilakukan dengan melibatkan beberapa panelis yang berasal dari regulator, operator seluler, dan pakar dibidang telekomunikasi, dengan jumlah panelis 17 orang. Analisis data dilakukan dengan *fuzzy-analytical hierarchical process* (F-AHP) dan kuantitatif deskriptif. Sebelum pengumpulan data dilakukan, tim studi menyusun draf kuesioner dan mengirimkannya kepada beberapa narasumber terpilih yang mewakili ketiga kelompok panelis. Berikut adalah temuan-temuan yang diperoleh:

1. Sistem pengalamanan IP masih memiliki beberapa kekurangan sehingga tidak bisa diaplikasikan pada semua layanan IoT/M2M. Namun pemerintah tetap dapat mendorong penggunaan IP untuk layanan yang sudah memungkinkan menggunakannya
2. Dengan melakukan ekstrapolasi terhadap hasil proyeksi Ericsson yang dirilis pada bulan juni 2020 dan didukung data-data dari BPS, Bank Dunia, dan ITU, asumsi CAGR perangkat IoT/M2M antara 18% sampai 28%, serta rentang waktu sampai 2030, sistem penomoran seluler saat ini memiliki kapasitas yang sangat mencukupi kebutuhan, baik untuk nomor layanan konvensional maupun IoT/M2M.
3. Hasil analisis dengan *fuzzy-AHP* diperoleh preferensi umum dari para panelis sebagai berikut:
 - a. aturan terkait nomor pelanggan untuk layanan IoT/M2M: memiliki panjang 15 digit, memasukkan kode sektor ke dalam struktur penomoran, dan memiliki *national destination code* (NDC) yang berbeda dengan layanan konvensional.
 - b. aturan terkait IMSI untuk layanan IoT/M2M: panjang *mobile country code* (MNC) 2 digit (status quo) dan memiliki MNC yang berbeda dengan MNC layanan konvensional.
 - c. perlunya melakukan migrasi nomor-nomor IoT/M2M yang telah dialokasikan jika tidak sesuai ketentuan. Namun perlu pertimbangan mendalam untuk nomor-nomor yang proses migrasinya dapat mengganggu proses produksi, aksesnya membahayakan, atau menyebabkan terganggunya layanan-layanan yang bersifat darurat.
 - d. perlunya peningkatan persyaratan nomor aktif untuk setiap permohonan NDC tambahan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penomoran

4. Hasil analisis kuantitatif deskriptif menemukan persentase tertinggi dari jawaban responden:
 - a. Menolak penggunaan penggunaan penomoran *extra-territorial* dan penomoran global. Namun dapat dipertimbangkan jika ditemukan aplikasi tertentu yang belum dapat dipenuhi perusahaan lokal, tetapi sifatnya hanya sementara dan perlu dialihkan ke nomor lokal setelah periode tertentu.
 - b. Menganggap aturan registrasi nomor seluler saat ini masih relevan untuk diterapkan pada IoT/M2M. Namun untuk meminimalisasi penyelenggaraan, aturan registrasi dapat menambahkan penggunaan biometrik untuk proses verifikasi.
5. Upaya-upaya untuk mendorong persaingan yang sehat di antara para operator perlu dilakukan, salah satunya dengan meminimalisasi biaya peralihan (*switching cost*) antar operator. Berikut adalah beberapa alternatif untuk meminimalisasi biaya peralihan (bersifat komplementer):
 - c. Mendorong penggunaan e-SIM. Penggunaan e-SIM memungkinkan peralihan operator tanpa harus mengganti fisik kartu SIM yang akan sangat menyulitkan/membahayakan dan mahal terutama jika perangkat-perangkat IoT/M2M sudah diakses dan jumlahnya masif.
 - d. Mewajibkan operator untuk meng-*unlock* perangkat pada paket *bundling* layanan konektivitas dan perangkat, setidaknya ketika masa kontrak berakhir
 - e. Model *shared-MNC*. Opsi ini juga dapat dipilih, namun kehati-hatian di dalam implementasinya karena masih sedikit informasi terkait model ini sehingga tingkat keberhasilan dan keberlanjutannya masih perlu kajian yang lebih mendalam.
 - f. *Mobile number portability* (MNP). Opsi ini tidak relevan dengan karakteristik IoT/M2M, namun tetap dapat dijalankan sejalan dengan pemberlakuan MNP pada layanan konvensional.

2. Studi Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos

Studi ini bertujuan untuk menyusun standar indeks kepatuhan penyelenggara pos yang menjadi indikator pembinaan terhadap penyelenggara pos oleh pemerintah. Penyusunan indeks kepatuhan penyelenggara pos mengidentifikasi unsur-unsur kepatuhan penyelenggara pos terhadap: (1) pemenuhan prinsip dan asas penyelenggaraan pos, (2) kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan nasional, serta (3) kepatuhan terhadap Standar Layanan Pos Komersial.

Studi dilaksanakan pendekatan *mixed method* dengan pendekatan kualitatif untuk menggali variabel dan indikator yang akan digunakan dalam penyusunan indeks kepatuhan serta mengidentifikasi kendala/ hambatan pemenuhan kewajiban penyelenggara pos. Variabel dan indikator tersebut kemudian disusun dalam kuesioner untuk diujikan secara kuantitatif kepada responden penyelenggara pos. Survei dilaksanakan secara online karena keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor hambatan penyelenggara pos dalam melakukan pemenuhan kewajiban dan komitmen berasal dari eksternal maupun internal penyelenggara pos. Sedangkan hasil pengukuran indeks kepatuhan penyelenggara pos secara agregat menunjukkan nilai cukup memenuhi. Asas penyelenggaraan pos merupakan dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan (zona hijau), sementara dua dimensi lainnya yakni regulasi dan kebijakan, serta standar layanan pos komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning).

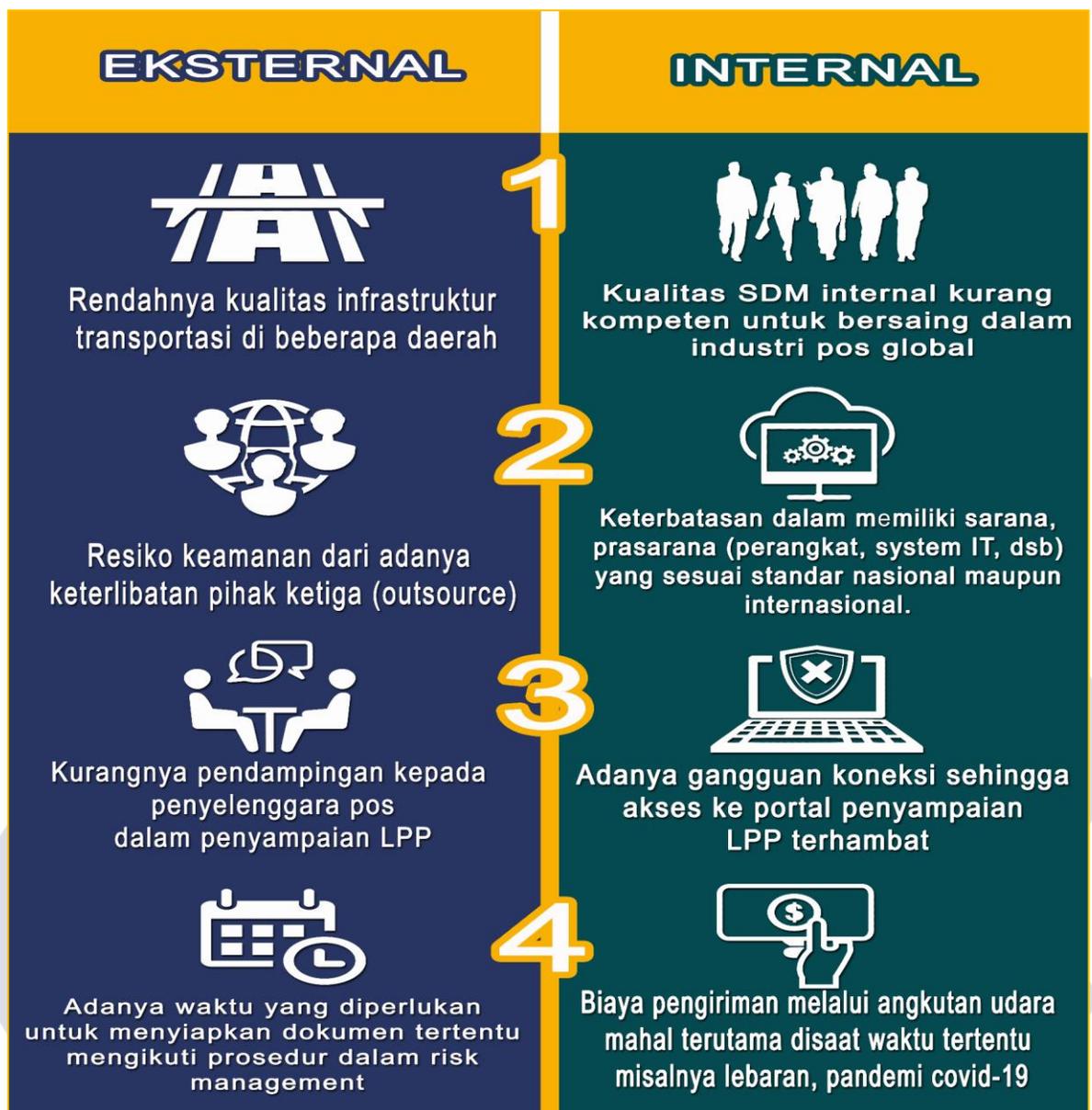
Penelitian dilakukan dalam dua tahapan yaitu penyusunan standar indeks kepatuhan penyelenggara pos dengan FGD pakar untuk dapat merumuskan variabel dan indikator indeks kepatuhan, dan pengujian kerangka indeks yang telah disusun melalui kuesioner secara online kepada penyelenggara pos.

Penyusunan penilaian kepatuhan penyelenggara pos dapat dilihat berdasarkan aturan/ regulasi terkait kewajiban dan komitmen yang dipetakan dalam 3 dimensi: Asas Penyelenggaraan Pos (Kecepatan & Keamanan, Kerahasiaan, Perlindungan, Kemandirian, dan Kemitraan), Regulasi dan Kebijakan (Perizinan Pos, Bea/Cukai/Pajak, Karantina, Perlindungan Konsumen) dan Standar Layanan Pos Komersial (Keamanan dan Kerahasiaan, Pengaduan, Saran dan Informasi, Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas, Ganti Rugi, Informasi Layanan).

Dimensi dan indikator penilaian tersebut diujikan secara profiling melalui kuesioner secara online (dikarenakan pandemi covid-19) kepada penyelenggara pos. Responden dalam penelitian adalah penyelenggara pos yang memiliki ijin pos dan diklasifikasi berdasar skala usaha besar, sedang dan kecil. Dari hasil survei, diketahui secara agregat indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan nilai cukup memenuhi kepatuhan. Asas penyelenggaraan pos merupakan dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan (zona hijau). Sementara itu dua dimensi lainnya yakni regulasi & kebijakan, dan Standar Layanan Pos Komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning). Hasil self assessment tersebut ke depannya perlu divalidasi dengan observasi/ monitoring kepada penyelenggara pos.

Hambatan penyelenggara pos dalam melakukan pemenuhan kewajiban dan komitmen telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Hambatan berdasarkan dari pengaruh eksternal dan internal dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Hambatan Pemenuhan Kewajiban dan Komitmen Penyelenggara Pos



Sebagai upaya untuk merealisasikan penilaian kepatuhan terhadap penyelenggara pos maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan berikut:

1. Mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial sebagai dasar pengukuran penilaian kepatuhan penyelenggara pos.
2. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penyelenggara pos secara berkala. Pemantauan ini dilakukan terhadap semua penyelenggara pos dengan cara melakukan *self assessment* tiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan ini melekat pada suatu sistem tertentu sehingga memiliki daya tekan terhadap penyelenggara pos (menjadi syarat perpanjangan ijin atau syarat mengikuti tender pemerintah dsb) .
3. Memberikan apresiasi (*award*) kepada penyelenggara pos yang mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi serta memberikan teguran dan pembinaan pemenuhan komitmen/ kewajiban kepada penyelenggara pos dengan tingkat Kepatuhan Sedang dan Kepatuhan Rendah.
4. Klusterisasi penyelenggara pos berdasarkan skala usahanya untuk pemisahan kategori kewajiban .
5. Berdasarkan hasil survey terkait kepemilikan sarana, prasarana, dan/ fasilitas bahwa tidak semua penyelenggara memiliki sendiri sarana, prasarana dan/ fasilitas, melainkan sewa bahkan tidak memiliki. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan diksi “harus memiliki” dalam RPM Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial pasal 11 :

“Penyelenggara Layanan Pos Komersial harus memiliki sarana, prasarana dan/atau fasilitas sebagai penunjang utama untuk dapat menyelenggarakan Layanan Pos Komersial agar tercapai layanan prima. “

3. Studi Grand Design Penomoran Televisi Digital *free-to-air* Indonesia

Studi ini bertujuan memberikan rekomendasi pengaturan penomoran Televisi Digital *free-to-air* Indonesia agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran dan mengharmonisasikan alokasi *Service Information* di Indonesia dengan alokasi dan penetapan yang telah ditentukan oleh *DVB Project*. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data Delphi (*expert judgment*), sedangkan metode pengolahan data untuk mencapai konsensus dilakukan dengan *analytical hierarchical process* (AHP).

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada pengaturan penomoran televisi digital free-to-air Indonesia berbasis Digital Video Broadcasting v.1.3.1 yang meliputi pengaturan penomoran umum, penomoran identitas, penomoran topologi jaringan, penomoran virtual, penomoran bersiaran, dan pengaturan penomoran kebencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tercapai konsensus pakar terkait pertanyaan kuesioner pengaturan penomoran TV digital free to air di Indonesia. Kesepakatan yang tercapai dalam penelitian ini di antaranya Direktorat Penyiaran sebagai otoritas penomoran, alokasi LCN secara nasional dan lokal dengan mekanisme pemilihan LCN *first come first serve*, serta perlunya penetapan standar khusus EWS (*early warning system*) TV digital di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data Delphi (*expert judgment*), di mana para panelis/informan diminta untuk menilai *item-item* tentang pengaturan penomoran televisi digital. Konsensus dinilai menggunakan metode *analytical hierarchical process*, sedangkan isian pendapat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari konsensus terhadap item-item tersebut diolah untuk memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam pengaturan penomoran televisi digital. Responden dalam penelitian terdiri atas 3 cluster yaitu penyelenggara siaran dan manufaktur receiver. Sebanyak 20 stakeholder/ekspert memberikan pendapat melalui kuesioner online dalam penelitian ini yang terdiri atas 4 penyelenggara siaran, 4 manufaktur receiver dan 12 regulator.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada pengaturan penomoran televisi digital free-to-air Indonesia berbasis Digital Video Broadcasting v.1.3.1 yang meliputi pengaturan penomoran umum, penomoran identitas, penomoran topologi jaringan, penomoran virtual, penomoran bersiaran, pengaturan penomoran kebencanaan. Kuesioner penelitian mencakup pertanyaan tentang profil demografis (yaitu posisi stakeholder pada organisasi, dan bidang pekerjaan) dan pendapat stakeholder tentang *item-item* pengaturan penomoran televisi digital yang telah kami kembangkan dari *benchmark* terhadap negara-negara yang mengadopsi teknologi DVB dan telah mengatur penomorannya.

Berdasarkan hasil Delphi dengan dua putaran survei, dicapai konsensus untuk 3 bagian besar dalam pertanyaan kuesioner yaitu :

Gambar 3.2
Tiga Bagian Besar Konsensus



Hasil dari masing-masing konsensus dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Konsensus Pengaturan Umum

No	Pengaturan Umum	Konsensus
1.	Otoritas Penomoran:	Direktorat Penyiaran
2.	Biaya Administrasi:	Sampai nomor kadaluarsa*
3.	Jangka Waktu Kepemilikan Nomor:	s.d. izin terkait berakhir
4.	Lembaga yang memancarkan Emergency Broadcast System:	Multi-channel EBS
5.	Alokasi Network_ID:	Alokasi nasional dan lokal
6.	Penetapan Network_ID:	1 induk SSJ = 1 NID
7.	Pengaturan Service_ID:	[Penjatahan] 60 service_id
8.	Pengaturan Country_Region_ID:	Zona waktu*

*dilakukan pertanyaan ulang di Round 2

Tabel 3.4
Konsensus Pengaturan LCN

No	Pengaturan LCN	Konsensus
1.	Alokasi LCN:	Nasional dan lokal
2.	Sharing LCN:	Dengan afiliasi yang sama*
3.	Mekanisme Perolehan LCN:	first come, first serve
4.	Biaya Administrasi:	dikenakan biaya hanya satu kali
5.	Perlakuan nomor yang tidak digunakan (Vacated LCN):	segera dikosongkan

*dilakukan pertanyaan ulang di Round 2

Tabel 3.5
Konsensus *Receiver Behaviour*

No	Receiver Behaviour	Konsensus
1.	Filtering Content	Mayoritas stakeholder setuju agar dilakukan filtering konten, di mana konten yang tidak memiliki <i>country code</i> 360 diabaikan
Receiver Behaviour LCN		
2.	LCN di Wilayah Beririsan:	mayoritas stakeholder setuju jika terdapat 2 LCN yang sama maka dimasukkan ke LCN 800 - 999
	LCN di Wilayah Perbatasan	mayoritas stakeholder setuju jika LCN dari luar negeri tidak diproses oleh <i>receiver</i>
Receiver Behaviour untuk Siaran Kebencanaan (Emergency Broadcast System)		
3.	Deteksi Bencana	mayoritas responden setuju agar filtering bencana dari sisi <i>cell_id</i>
	Pesan Kebencanaan	mayoritas stakeholder menyepakati format siaran video-audio
	Penomoran Siaran Kebencanaan	mayoritas stakeholder setuju terhadap perubahan penomoran bencana
Receiver Behaviour untuk Electronic Program Guide		
4.	Parental Lock	parental lock perlu didiskusikan dengan KPI
	Menu dan Bahasa	semua stakeholder menyetujui untuk ada 2 menu bahasa
5.	Manufacturer Identity (<i>manufacture_id</i>):	mayoritas stakeholder menganggap bahwa Manufacturer Identity perlu dibuat dan diatur oleh Direktorat Standardisasi

Untuk mencapai target ASO di 2020, hasil penelitian terkait penomoran perlu ditindaklanjuti dengan implementasi dan mempersiapkan regulasi yang sejalan sebagai paying hukum. Selain itu beberapa hal yang perlu dibahas lebih mendetail seperti EWS (*Early Warning System*) perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Sistem Siaran Kebencanaan melalui TV digital perlu keterlibatan berbagai pihak seperti BMKG dan BNPB sebagai domain informasi kebencanaan.

4. Optimalisasi Media Online Kominfo Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Komunikasi Publik

Saat ini pemerintah tengah menghadapi krisis komunikasi publik. Bahkan Presiden Jokowi, melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, mengatakan komunikasi publik buruk (Detiknews, 21 Okt 2020). Tentu ini menjadi tugas Kemkominfo sebagai penanggungjawab pengelolaan komunikasi publik, walaupun bukan merupakan satu-satunya lembaga pelaksana komunikasi publik.

Kualitas komunikasi publik dipengaruhi oleh 5 elemen komunikasi: komunikator, pesan, saluran, komunikan dan efek. Terkait dengan saluran, ada beberapa kanal media yang dikelola oleh Kemkominfo untuk diseminasi informasi publik, diantaranya media cetak, media tatap muka, maupun media online. Keberadaan kanal-kanal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah, menjadi referensi utama informasi yang valid, meraih kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan citra pemerintah (paparan Dirjen IKP, 15 Oktober 2020). Maka efektivitas dari beberapa kanal media yang dikelola Kemkominfo, khususnya media online, dilihat dari sudut pandang netizen penting untuk dilakukan. Sebab media online semakin populer di masyarakat seiring dengan peningkatan akses terhadap internet, dan mengelola media online memiliki tantangan sendiri, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang telah meleburkan batas antara produsen dan konsumen informasi. Sehingga penyajian konten di media online tidak hanya memperhatikan format yang menarik seperti infografis, tetapi juga prinsip *searchable* dan *shareable*. Kelima media online yang menjadi objek survei yaitu: 1) indonesia.go.id; 2) infopublik.id; 3) indonesiabaik.id; 4) Gprrtv.id; dan 5) kominfo.go.id. Data survei persepsi netizen ini dianalisis menggunakan konsep AISAS, yang dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik responden.

Survei dilakukan secara online berseri selama bulan Juli 2020 melalui media sosial Kominfo untuk publikasinya. Dilakukan pula triangulasi data melalui *Focus Group Discussion* yang melibatkan perwakilan netizen dan pengelola kanal. Jumlah responden 1.495, dengan profil mayoritas berada pada rentang usia 15 – 24 tahun (50%) dan 25 – 34 tahun (32%). Dari segi gender, komposisi berimbang antara laki-laki (52%) dan perempuan (48%).

Tabel 3.6
Survey Online Focus Group Discussion Selama
Bulan Juni 2020

NO	MEDIA	MENGAKSES MEDIA	SKOR				
			(A)	(I)	(S)	(A)	(S)
			Attention	Interest	Search	Action	Share
1.	indonesia.go.id	51,9%	73	80	73	69	73
2.	indonesiabaik.id	62,6%	88	91	84	84	82
3.	infopublik.id	54,2%	80	82	81	78	76
4.	gprtv.id	46,6%	84	85	82	79	81
5.	kominfo.go.id	88,6%	88	88	87	85	84

Keterangan: *Attention* dan *Interest* termasuk dalam dimensi psikologis, sementara *Search-Action-Share* merupakan dimensi tindakan.

Secara keseluruhan, banyak responden (>50%) telah mengetahui dan pernah mengakses media online yang dikelola Kominfo. Kanal *indonesiabaik.id* dan *kominfo.go.id* lebih populer dibandingkan dengan kanal-kanal lainnya. Kanal *indonesiabaik.id* sangat tinggi untuk *interest*, sejalan dengan konten di kanal ini yang mayoritas disajikan dalam bentuk infografis. Sementara, nilai *search* (penelusuran) untuk kanal *kominfo.go.id* tertinggi dibandingkan dengan kanal-kanal yang lain, sejalan dengan posisinya sebagai kanal atas nama institusi. Hasil survei juga menunjukkan bahwa dimensi psikologis di kelima media lebih tinggi daripada dimensi tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa media online Kominfo memiliki potensi untuk dikembangkan kedepan.

Namun, jangkauan dari media online Kominfo masih sangat terbatas. Terlihat dari data sekunder *similarweb.com* diketahui bahwa total *visits* untuk kelima media online Kominfo sebanyak 3,5 juta pengunjung, atau hanya berkisar 1,9% dari total pengguna internet Indonesia yang mencapai 175,4 juta pengguna.

Secara umum, platform yang paling banyak digunakan untuk mengakses media *online* Kominfo adalah *website* dan media sosial Instagram. Namun masing-masing media, memiliki platform unggulan seperti indonesia.go.id dan infopublik.id yang paling banyak diakses melalui website, sementara indonesiabaik.id paling banyak diakses di Instagram.

Selain hasil survei, analisis dari *similarweb.com* juga dapat menunjukkan akses masyarakat terhadap kelima media online Kominfo.

Tabel 3.7
Survei Analisis Media Online Kominfo
Sumber: analisis *similarweb.com* (15 Oktober 2020)

NO	Kanal	Direct	Referral	Search	Social	Daily Unique Visitors	Average time on sites (minutes)
1.	indonesia.go.id	16,4%	0,7%	82,5%	0,4%	4200	2:22
2.	indonesiabaik.id	7,5%	0,1%	92,1%	0,3%	20	1:24
3.	infopublik.id	22,8%	0%	58,1%	9,7%	3800	8:03
4.	gprtv.id	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A
5.	kominfo.go.id	38,1%	2,9%	52,5%	2,4%	16.906	4:09

Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah *daily unique visitors* kanal kominfo.go.id rata-rata 16.906 pengunjung unik setiap harinya. Sementara itu, rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung untuk mengakses masing-masing kanal berada pada rentang 1-8 menit. Diketahui pula bahwa media online yang dikelola Kominfo diakses berdasarkan hasil pencarian di *search engine*, bukan diakses secara langsung (*direct*). Hal ini selaras dengan hasil FGD dengan beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan pencarian informasi melalui *search engine* dibandingkan langsung mengakses laman website tertentu.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah, penggunaan media sosial oleh pemerintah perlu diukur dengan mempertimbangkan aspek jangkauan, frekuensi dan lalu-lintas, pengaruh, percakapan dan keberhasilan, serta keberlanjutan. Kelima aspek ini perlu menjadi target dari pengembangan media online Kominfo untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Media-media yang dikelola oleh Kominfo khususnya media online harus dapat lebih dikenal dan populer di kalangan masyarakat dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Pengelola kanal dapat secara berkala mengevaluasi apakah media tersebut memiliki dampak terhadap penggunanya dan kembali mengakses, sesuai dengan parameter-parameter yang tertera pada Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2012. Media online tersebut perlu didorong untuk mampu bersaing dengan media online mainstream, sehingga kinerja dan fungsinya tidak hanya untuk diseminasi informasi, namun juga dapat menjadi pembentuk opini dan melakukan *counter* isu di pihak pemerintah.
2. Optimalisasi kanal diseminasi informasi publik yang berbasis website dengan memanfaatkan *search engine optimization* dan Google AMP untuk meningkatkan visibilitas kanal dan membuat laman kanal lebih mudah diakses publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan dan *traffic* pengunjung website.
3. Dalam hal konten, media online Kominfo perlu antisipatif terhadap isu yang akan marak di masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan mesin pengais yang dimiliki oleh Kominfo, untuk dapat *crawling* data dan melakukan analisis sentimen terhadap isu-isu terbaru secara harian sehingga dapat membuat konten yang 'update' dan tidak kalah cepat dari media mainstream untuk penangkalan isu negatif, konten hoax, pemberian informasi yang benar dan komunikasi publik yang baik.
4. Dilihat dari akses netizen terhadap media-media online Kominfo, terdapat platform yang lebih banyak digunakan untuk media tertentu sehingga sebaiknya media online tersebut dapat fokus/spesifik di 1-2 platform saja, tidak perlu masuk ke semua platform seperti indonesiabaik yang bisa fokus ke Instagram saja.

5. Membentuk tim khusus (ad-hoc) untuk mengelola kanal secara khusus tanpa dibebani tanggung jawab lain di luar pengelolaan kanal. Tim ini dapat terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di media, seperti jurnalis, reporter, redaktur, produksi berita dan sebagainya.
6. Meningkatkan skill pengelola kanal dengan memberikan pelatihan khusus kepada pegawai dari expert langsung di bidang ini atau mengadakan kegiatan *sharing knowledge best practice* dengan media mainstream.
7. Memangkas prosedur birokrasi atau mempercepat proses produksi konten agar prinsip cepat, tepat dan akurat dapat tercapai sehingga media pemerintah mampu bersaing dengan media mainstream.
8. Produksi konten di media online Kominfo sangat mungkin diintegrasikan dengan sistem otomatisasi konten menggunakan infrastruktur dan aplikasi tertentu sehingga update berita, foto, video, televisi, bisa dikerjakan secara cepat dan tepat. Konsep ini tidak memerlukan lagi banyak ragam kanal, dan sangat efisien.
9. Penguatan kelembagaan komunikasi publik dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi personil dan manajemen komunikasi yang adaptif terhadap perubahan, namun untuk jangka panjang ke depan pembentukan lembaga komunikasi publik sendiri yang independen, dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Namun, dibutuhkan kajian khusus untuk mendukung hipotesis ini.

5. Studi Kesiapan Kementerian/Lembaga Dalam Mengimplementasikan Sistem Big Data Nasional

Semakin masifnya penggunaan perangkat TIK dan internet di era industri 4.0 telah menghasilkan data yang sangat besar, beragam, dan dalam rentang waktu yang sangat cepat. Data-data tersebut sangat berpeluang menghasilkan informasi yang berharga apabila diolah dengan menggunakan teknologi *Big Data Analytics*.

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, ingin melihat kesiapan instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), menuju terwujudnya sistem big data nasional 5 tahun kedepan. Studi melibatkan 62 instansi, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melalui pengisian kuesioner terstruktur (kuantitatif) dan kegiatan Webinar (kualitatif) dengan narasumber/informan Kepala/perwakilan dari setiap Pusat Data (Pusdatin) K/L.

Walaupun mayoritas Kementerian/Lembaga belum menerapkan *big data analytics* secara menyeluruh di satuan kerja, tetapi beberapa K/L sudah memiliki *use case-use case* penggunaan teknologi big data di pemerintahan, seperti penggunaan text mining di beberapa K/L, analisis data media sosial, profiling untuk mendeteksi tindakan penyelundupan, analisis harga dengan data yang bersumber dari *marketplace*, analisis data historis dari kegiatan longitudinal, serta analisis data tingkat lanjut lainnya.

Sementara kesiapan K/L dalam mengimplementasikan big data akan dilihat dari 3 variabel, yaitu Kesesuaian Organisasi (*Organization Alignment*), Kematangan Organisasi (*Organization Maturity*), dan Kemampuan Organisasi (*Organization Capabilities*).

Dari hasil survei dan pemaparan dalam webinar, diketahui potret kesiapan K/L dalam mengimplementasikan sistem *big data*, antara lain:

- 1) Dilihat dari dimensi pertama yaitu *Organizational Alignment (OA)* atau keselarasan organisasi, dengan nilai mediannya dari secara keseluruhan adalah **64 dari skala 100**. Dari hasil studi pada dimensi ini diketahui:
 - Dari 53 K/L terdapat 28 K/L (53%) belum merencanakan Big Data, dalam hal ini belum ada Big Data di dalam resntra atau belum ada roadmap terkait dengan Big Data.
 - Kemudian, bila dilihat dari struktur organisasi, baru terdapat 17 K/L (32%) yang memiliki struktur organisasi khusus yang mengawal implementasi Big Data, dari 17 K/L tersebut sebagian besar strukturnya bersifat task force/ad hoc setara eselon 3 dan/atau 4.
- 2) Dilihat dari dimensi kedua yaitu *Organizational Maturity (OM)* atau kematangan organisasi, dengan nilai mediannya secara keseluruhan adalah **70 dari skala 100**. Dari dimensi ini, terdapat catatan antara lain:
 - Dari aspek berbagi pakai data, diketahui sebanyak 32 K/L (60%) masih belum ada kebijakan untuk membuka akses *raw data*-nya bahkan untuk akses dalam lingkup antar eselon 1 (internal) hanya sedikit K/L yang memberikan kebijakan akses *raw-data* tersebut.
 - Kemudian dari aspek pengelolaan data secara terpusat terdapat 24 K/L (46%) yang masih belum melakukan.

3) Dilihat dari dimensi ketiga yaitu *Organizational Capabilities (OC)* atau kapabilitas organisasi, dengan nilai mediannya secara keseluruhan adalah **57 dari skala 100**. Dari hasil studi pada dimensi ini diketahui:

- Pada aspek kepatuhan kebijakan, mayoritas K/L belum ada kebijakan internal yang terkait dengan Big Data, dan belum menerapkan standar keamanan
- Aspek SDM masih menjadi kendala klasik, 53% K/L belum memiliki SDM dengan keahlian yang mendukung implementasi big data, baik *Big Data Analytic*, *Data Warehouse*, dan *Data Engineering*. Hanya 4-5 K/L yang sudah memiliki SDM tersertifikasi keahlian tersebut.

Dari nilai ketiga dimensi tersebut, dilakukan *confirmatory factor analysis* untuk melakukan pembobotan dari setiap dimensi, dan didapatkan untuk dimensi OA sebesar 0.32, OM sebesar 0.346, dan OC sebesar 0.334 untuk menganalisis tingkat kesiapan dari seluruh K/L. Kemudian, dilakukan juga *expert judgement* untuk melakukan pengelompokan kesiapan K/L. Dari hasil analisis, secara keseluruhan didapatkan K/L yang tingkat kesiapannya terkait dengan implementasi Big Data, antara lain:

- Tidak ada K/L yang sangat tidak siap (nilai ≤ 30)
- Terdapat 8 K/L atau 15% yang tidak siap (nilai $>30-50$) dengan nilai rata-rata 43
- Terdapat 35 K/L atau 66% yang moderat (nilai $>50-75$) dengan nilai rata-rata 62.7
- Terdapat 10 K/L atau 19% yang siap (nilai $>75-85$) dengan nilai rata-rata 78.6
- Tidak ada K/L yang sangat siap (nilai >85) dengan nilai rata-rata 81.6.
- Secara keseluruhan, nilai rata-rata tingkat kesiapan dari 53 K/L adalah 62.71

Dari 10 K/L tersebut yang memiliki nilai sudah siap antara lain:

1. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
2. Kantor Staf Presiden
3. Kementerian Keuangan
4. Badan Pusat Statistik
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Badan Informasi Geospasial
7. Kementerian Sekretariat Negara
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dukungan K/L Saat Ini Terkait dengan Big Data

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* dengan beberapa K/L, didapatkan beberapa dukungan terkait dengan implementasi sistem Big Data Nasional, antara lain:

1. Bappenas dan BPS sudah menyediakan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) yang akan memuat seluruh data pemerintah dan data instansi lain dan dapat diakses secara terbuka.
2. BPS sudah menyusun beberapa kebijakan terkait dengan standar data dan metadata yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas data dan metadata yang terdapat di setiap K/L dan Pemerintah Daerah.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang membangun Pusat Data Nasional yang nantinya akan direncanakan untuk dilengkapi dengan layanan Big Data (*Big Data as a Service*) berbasis *cloud*. Layanan ini diharapkan agar K/L dan Pemerintah Daerah ke depannya bisa saling berkolaborasi dan bisa mengoptimalkan infrastruktur Pusat Data tersebut apabila ingin melakukan *Big Data Analytic* tanpa harus membangun dan mengelola infrastruktur sendiri.
4. BPPT saat ini sedang mempersiapkan teknologi Big Data yang nantinya diharapkan bisa mengisi Pusat Data Nasional dengan aplikasi-aplikasi Big Data yang sedang dikembangkan.

Dari hasil studi ini, tim peneliti menyusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat implementasi big data di lingkungan pemerintahan, diantaranya:

- Diperlukan adanya dukungan manajemen dalam bentuk dokumen formal seperti Renstra/Roadmap yang terkait dengan Big Data, sehingga implementasi Big Data pada suatu instansi menjadi lebih terarah dan memiliki target yang jelas.
- Mengembangkan kebutuhan analisis prediktif dan preskriptif dalam organisasi, sehingga mendorong penggunaan teknologi big data untuk memenuhinya.
- Menyiapkan pengelolaan data secara terpusat di masing-masing instansi.
- Adanya kebijakan untuk membuka akses raw data sehingga memperluas kesempatan kolaborasi big data analytics lintas Kementerian/Lembaga dengan berbagi raw data.
- Menyiapkan regulasi internal mengacu pada standar nasional/internasional sebagai landasan kerangka kerja pelaksanaan Big Data di instansi.
- Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian yang dibutuhkan terkait dengan data yaitu *Data Analytic*, *Data Warehouse*, dan *Data Engineering*.

6. Strategi Diseminasi Nilai-nilai Pancasila pada Generasi Milenial

Mencuatnya masalah transnasional yang ditonjolkan pihak Barat terutama AS dengan propoganda terorisme pasca tragedi WTC 11 September 2001 mengakibatkan bermunculan ideologi baru sebagai perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi. Hal ini rawan dimanfaatkan oleh masuknya ideologi asing ke bumi Nusantara. Dikhawatirkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengancam ideology Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara sejak Indonesia berdiri, dinilai semakin terdegradasi nilai-nilainya di masyarakat, khususnya di kalangan generasi millennial. Salah satunya pengaruh teknologi informasi dan internet yang menjadi media penting bagi penyebaran doktrin radikalisme dan intoleransi yang sering menyasar mahasiswa dan pelajar.

Generasi muda tahun 1990-an dan 2000-an banyak yang tidak mengenal Pancasila ataupun maknanya. Sejumlah survei mengungkapkan potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila diantaranya: Survei Alvira Research Center (2018) menunjukkan ada 17,8 % mahasiswa dan 18,4 % pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal, sementara Survei Riset Mandiri Tirta (2018) menunjukkan bahwa pemahaman dan preferensi generasi muda mengenai Pancasila cukup baik meskipun ada 14,8 % responden yang tidak hafal dengan urutan Pancasila, dan hasil Survei CSIS (2017) menunjukkan bahwa dukungan terhadap Pancasila masih kuat di kalangan generasi milenial yaitu 90,5 %, namun terdapat 9,5 % yang sepakat mengganti Pancasila. Upaya komunikasi, diseminasi informasi dan edukasi telah dilakukan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo bersama dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), namun dampak dan penerimaannya di kalangan generasi millennial masih belum optimal.

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan diseminasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Ditjen IKP tahun 2019-2020 diketahui bahwa:

- Program kegiatan diseminasi nilai-nilai Pancasila hanya dilakukan oleh satu Direktorat di Ditjen IKP, belum diharmonisasi dalam kegiatan diseminasi di Direktorat lainnya.
- Komunikator yang dipilih oleh Ditjen IKP telah melibatkan influencer. Namun content creator atau influencer yang dipilih, ternyata belum secara aktif mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila dalam media sosial pribadinya, masih terbatas dalam event-event yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP. Contohnya pada akun 2 content creator yang diajak bekerjasama yaitu Cindy Gulla dan Rio Ardhillah.
- Konten di akun Youtube GNFI (Good News from Indonesia) sebagai mitra Ditjen IKP dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila hanya mendapat viewer < 100, karena acara yang dikemas hanya berupa talk show sehingga kurang menarik bagi generasi millennial.
- Saluran yang digunakan oleh Ditjen IKP untuk diseminasi nilai-nilai Pancasila telah menggunakan media sosial, melalui akun Pendekar (Pendidikan Karakter) Pancasila. Berdasarkan "Laporan Konten Media Sosial Pendekar Pancasila" diketahui konten yang diposting di akun tersebut masih sangat terbatas, dari periode Maret sampai Juni 2020, rata-rata jumlah konten di setiap platform media sosial (Instagram, Twitter, Facebook) sebanyak 5-7 konten per bulan, dan lebih sedikit lagi melalui Youtube.

- Dari beragam kegiatan yang dapat dilakukan untuk komunikasi/diseminasi informasi, kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen IKP dapat diklasifikasikan menjadi: sosialisasi, talkshow dan special events. Beberapa kegiatan yang tampaknya belum dilakukan seperti kampanye, penyiaran, dan melalui perfilman.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah:

- Menggalakkan kembali pendidikan Pancasila dan budi pekerti mulai dari keluarga sejak usia dini dan sekolah (PAUD) hingga perguruan tinggi sehingga nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan sikap empati benar-benar dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan generasi penerus bangsa.
- Mengoptimalkan kinerja dari tiap-tiap direktorat di Ditjen IKP melalui sinergi program ketika melakukan diseminasi informasi, dimana di semua direktorat ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat wajib mencantumkan logo Pancasila atau memasukkan nilai Pancasila, sehingga tidak terkesan bahwa hanya satu direktorat saja yang bekerja dan bertanggungjawab menyebarkan nilai Pancasila.
- Melibatkan partisipasi publik khususnya milenial sebagai komunikator, pembuat konten pesan, melalui aplikasi, film, kartun, game, platform Media Sosial yang sebaiknya juga didukung Big Data, & kecerdasan buatan (Artificial Intelligence-AI). Untuk menggugah partisipasi publik tersebut dapat dilakukan bentuk kompetisi, quiz, festival, kampanye, maupun gerakan nasional.
- Memperluas Literasi Digital tentang nilai-nilai luhur Pancasila dengan konten dikemas kekinian yang berisikan praksis Pancasila secara nyata di masyarakat secara terstruktur, masif, dan sistematis sebagai contoh dengan menayangkan content berisikan keteladanan nilai Pancasila di ruang public, di sekolah, dan media sosial seperti tentang budaya antri, menghormati orang tua, tidak melakukan perilaku bullying, dsb.
- Memperkuat kerjasama dengan content creators supaya mereka lebih aktif memberikan pesan-pesan Pancasila melalui hashtag-hashtag yang menarik bagi kalangan generasi milenial. Perlu juga menggandeng lebih banyak content creator yang terkenal dengan banyak follower, memiliki reputasi untuk menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan memiliki visi nasionalis.

- Bekerjasama dengan komunitas-komunitas penggiat Pancasila seperti Rumah Pancasila dan Kampung Pancasila sebagai upaya melibatkan partisipasi publik dalam pembumih Pancasila
- Menggunakan komunikator ulama yang moderat tentang nilai-nilai Pancasila ke sekolah-sekolah yang terindikasi ada perekrutan pengikut ideologi asing.

Untuk memastikan hasil Penelitian tepat sasaran, tepat sasaran, bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti oleh *stakeholders*, Badan Litbang SDM telah mendapatkan masukan judul Penelitian dari satker *user* yang akan menggunakan hasil Penelitian agar hasil penelitian tepat guna dan tepat sasaran serta dapat langsung digunakan menjadi landasan kebijakan. Dengan target 60% Penelitian bermanfaat untuk menjadi kebijakan, maka minimal 4 (empat) Penelitian dari total 6 (enam) penelitian harus dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders*.

Setelah Penelitian selesai di penghujung tahun 2020, Laporan Penelitian didarkan ke *stakeholders* untuk menilai kebermanfaatannya hasil penelitian apakah dapat menjadi acuan pengambilan keputusan/kebijakan. Berikut merupakan rekap kuesioner *feedback* Penelitian:

Tabel 3.8
Feedback Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2020

No	Judul	Stakeholder	Bermanfaat (√) Tidak (x)
1	Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos (Long Study)	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) • Direktorat Pos (Ditjen PPI) 	√
2	Grand Design Penomoran Televisi Digital Free-to-Air Indonesia (Short Study)	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pos (Ditjen PPI) • Direktorat Telekomunikasi (Ditjen PPI) 	√

No	Judul	Stakeholder	Bermanfaat (√) Tidak (x)
3	Studi Kebijakan Penomoran Internet of Things/Machine to Machine Communications di Indonesia (Short Study)	Direktorat Telekomunikasi (Ditjen PPI)	√
4	Kesiapan Implementasi Big Data Pemerintah (Long Study)	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Ditjen Aptika)	√
5	Pengembangan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Implementasi, Nilai-nilai Pancasila (Long Study)	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK, Ditjen IKP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 	√
6	Efektivitas Multi Kanal dalam Diseminasi Informasi Kebijakan Publik (Long Study)	Direktorat Pengelolaan Media (Ditjen IKP)	√

Dari rekap di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) Penelitian dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders* dari total 6 (enam) Penelitian. Angka ini melampaui target awal yakni 4 (empat) Penelitian atau 60% Penelitian yang dihasilkan dianggap Bermanfaat. Maka, Penelitian yang dihasilkan Badan Litbang SDM **dinilai 100%** Bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti *stakeholders*.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi dari Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penelitian Dhasilkan yang Bermanfaat} = 6}{\sum \text{Target Penelitian Dhasilkan yang Bermanfaat} = 4} \times 100\% = 150\%$$

Dari rekap di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKSP 1.1. (Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika) cukup jauh melampaui target yang semula diperkirakan 60%, dengan perhitungan berikut:

$$\frac{\sum \text{Penelitian Dhasilkan yang Bermanfaat} = 100}{\sum \text{Target Penelitian Dhasilkan yang Bermanfaat} = 60} \times 100\% = 166,67\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Sumber dana Penelitian Tahun 2020 sendiri berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komunikasi sebesar Rp. 3.036.289.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.969.541.567 atau sekitar 97,80% dari total pagu.

Angka tersebut termasuk penelitian di BBPSDMP dan BPSDMP dimana beberapa di antaranya merupakan penelitian aspirasi daerah berdasarkan wilayah kerja dengan daftar judul sebagai berikut:

Tabel 3.9
 Penelitian Aspirasi Daerah

UPT	Judul Penelitian
BBPSDMP Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Literasi TIK ASN Kabupaten Wajo • Survei tingkat literasi ASN pengelola TIK Kota Palopo • Penelitian Strategi Humas Sebagai Mediator Pemerintah dan Masyarakat
BBPSDMP Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Analisis Strategi TIK SUMUT Smart Province menggunakan kerangka Kerja COBIT • Manajemen Komunikasi PEMPROPSU untuk Meningkatkan partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola SUMUT Smart Province
BPSDMP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Efektivitas Kegiatan Pengembangan SDM di BPSDMP Kominfo Jakarta
BPSDMP Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengetahuan Smart City di Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu • Literasi digital penyandang disabilitas di kota Bandung
BPSDMP Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Implementasi Smart city yang berkelanjutan di Kabupaten Tegal
BPSDMP Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Tata Kelola Start Up Pasar di Kabupaten Jember

UPT	Judul Penelitian
BPSDMP Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Survey kepercayaan, keamanan, dan <i>privacy</i> aplikasi meeting • Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ecommerce di Kalimantan Selatan
BPSDMP Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Preferensi Masyarakat Mengakses Informasi Program Pemerintah Sulawesi Utara dalam rangka Penyusunan Strategi Komunikasi Diseminasi Informasi

Faktor Pendukung

- Kebijakan pimpinan yang memperbolehkan Peneliti mengembangkan kepakarannya dan memfasilitasi pemenuhan Angka Kredit Tahunan (AKT) dan Hasil Kerja Minimal (HKM) seperti mengikuti *conference*, terlibat dalam pembentukan naskah akademis di satker lain, dan memfasilitasi pembayaran jurnal/prosiding/*book chapter*.
- Unit kerja *stakeholder* Kemenkominfo bersedia untuk terlibat langsung dalam penelitian sehingga membantu dalam pengumpulan dan analisis data.
- Dukungan teknologi sebagai *back up plan* dalam pengumpulan data agar pengumpulan data tetap terlaksana walau tidak sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan *Flexible Working Space* (FWS).
- Lokasi pengumpulan data di kota-kota besar yang memiliki koneksi internet yang prima.

Faktor Penghambat/Kendala

- Pandemi Covid19 menjadi kendala utama pada beberapa program prioritas karena membatasi pergerakan manusia. Proses pengumpulan data penelitian menjadi sulit, terutama yang menggunakan metode survei sehingga untuk mengatasinya pengumpulan data dilakukan secara daring melalui beberapa media/platform yakni WhatsApp, website, dan surat elektronik. Survei daring dirasa kurang efektif karena responden cenderung 'malas' mengisi. Atau pengisian tidak dilakukan oleh target responden yang semula dituju, namun didelegasikan kepada staf yang kurang paham isi pertanyaan. Validitas dan *margin of error* data pada metode survei daring juga terbilang cukup besar. Kelemahan lain metode daring adalah, tim peneliti tidak dapat melakukan validasi langsung seperti pada metode tatap muka. faktor penolakan responden juga cukup besar terjadi pada metode daring.
- Kurangnya SDM internal yang pakar di bidang statistic dan *big data analytic*, jadi seringkali mengandalkan statistisi/SDM dari akademisi.
- Kerap terjadi miskomunikasi antar anggota tim karena koordinasi dan diskusi kurang efektif sehubungan dengan adaptasi kenormalan baru dengan pelaksanaan FWS. Dengan kondisi ini, komunikasi sangat bergantung pada koneksi internet di kediaman/lokasi masing-masing yang bisa jadi tidak stabil.
- FGD atau penggalian materi dari narasumber menjadi kurang efektif apabila dilakukan melalui portal rapat daring dibandingkan dengan tatap muka.
- Kurangnya *tools* yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan penelitian, misalnya *tools* untuk *crawling data*, *big data analytic*.
- Pemberian *gimmick* atau hadiah pada pelaksanaan survei daring biasanya menarik ketertarikan responden atau calon responden untuk ikut serta namun hal ini kadang terpaksa dibatasi karena belum diakomodir pada peraturan terkait administrasi keuangan.
- *Refocusing* anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid19 menyebabkan kegiatan penelitian berhenti di tengah jalan atau bahkan batal dilaksanakan. Akibatnya, jumlah penelitian yang semula ditargetkan juga turut berkurang. Pemotongan anggaran juga menyebabkan beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari penelitian tidak dapat dilaksanakan prosesnya.
- Hasil penelitian biasanya kurang terpublikasikan dengan baik

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Pengambilan data melalui metode survei daring dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid19. Proses pengumpulan data sangat penting untuk menjadi objek analisis dan selanjutnya dilakukan penyusunan laporan awal penelitian yang berbobot sekitar 50% dari total *progress*.
- Kurangnya SDM internal akan kepakaran di bidang tertentu dan *tools* tertentu dalam pengumpulan data diatasi dengan melibatkan pihak ketiga.
- Memaksimalkan pelaksanaan tiap tahap penelitian sesuai anggaran yang tersedia dengan mengedepankan asas *quality over quantity*.
- Seminar penelitian dilaksanakan dalam bentuk webinar daring yang dikemas menarik dan mengundang masyarakat luas dengan *gimmick* hadiah bagi peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik agar terbangun interaksi 2 arah.

Rekomendasi

- Sebagai penyusun penelitian kebijakan yang harus berada selangkah lebih awal terhadap isu-isu hangat bidang TIK yang selalu dinamis, Peneliti di lingkungan Badan Litbang SDM perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Peneliti dengan diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang *up to date* agar tidak tertinggal dengan isu-isu terkini.
Sehingga, prioritas peningkatan kualitas SDM tidak hanya dilakukan untuk masyarakat umum tapi juga untuk kalangan internal pegawai Kemenkominfo pada khususnya.
- Perlu adanya platform/kegiatan dengan gaung nasional yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian kepada publik sehingga hasil penelitian dapat tersampaikan dan dimanfaatkan masyarakat umum, tidak hanya terbatas di kalangan Peneliti maupun pemerintahan.

SP 2. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

IKSP 2.1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS).

Tabel 3.10

IKSP 2.1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS).

SP.2 Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika				
Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Capaian	%
1.	Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS).	45.000	58.116	129,15%

Era Digitalisasi pada Industri 4.0 di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan hadirnya permintaan dan penawaran talenta digital dalam mendukung perkembangan ekosistem industri teknologi. Tantangan tersebut perlu dihadapi salah satunya melalui kegiatan inovasi dan inisiasi dari berbagai pihak dalam memajukan talenta digital Indonesia, baik dari pemerintah maupun mitra kerja pemerintah yang dapat menyiapkan angkatan kerja muda sebagai talenta digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2018-2019, telah menginisiasi Program *Digital Talent Scholarship* yang telah berhasil dianugerahkan kepada lebih dari 26.000 penerima pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Program *Digital Talent Scholarship* ini ditujukan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi tema-tema bidang teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan menjadi bagian untuk memenuhi permintaan dan penawaran talenta digital Indonesia.

Untuk memenuhi tenaga terampil dalam bidang *digital*, Kementerian Kominfo turut berperan dengan cara menyelenggarakan program *Digital talent Scholarships*. Program ini berangkat dari pemikiran bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu 2015-2030, Indonesia membutuhkan 9 juta *digital talent* atau sekitar 600 ribu orang setiap tahun. Untuk menyelenggarakan program ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan:

- 84 perguruan tinggi
- 9 perusahaan teknologi global: Amazone Web Services (AWS), IBM, Cisco, Google, Microsoft, Progate, Facebook, Red Hat, Oracle;
- 3 *start up* local: Dicoding, Tokopedia, Gojek
- BUMN: BRI, BNI
- Asosiasi: Asosiasi Digital Marketing Indonesia
- Mitra Industri bergabung di SIMONAS: 156 Perusahaan.

Tujuan utama program ini adalah mengurangi kesenjangan kemampuan *digital* di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Pandemi Covid-19 mengubah rancangan Program *Digital Talent Scholarship 2020*. Beasiswa pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi untuk menciptakan talenta digital, dirumuskan ulang sebagai program stimulan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi. Menkominfo Johnny G. Plate mengambil keputusan itu setelah mencermati kondisi yang berlangsung. Bahkan, untuk menjamin kesehatan pelaksana dan peserta, pelaksanaan pelatihan berlangsung dalam jaringan (*daring*). Jika pun berlangsung di luar jaringan (*luring*), tentu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tahun ini, Program *Digital Talent Scholarship* menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi lebih dari 45.000 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Program pelatihan DTS 2020 ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum dan aparatur sipil negara (ASN) di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era Industri 4.0.

Dengan dukungan mitra kerja dan pelaksana, perumusan ulang skema dan adaptasi di masa pandemi, membuat DTS 2020 dapat dilaksanakan dengan pembukaan 6 (enam) akademi, yaitu:

Gambar 3.3
Program *Digital Talent Scholarship*



Seperti tahun sebelumnya, DTS 2020 juga melibatkan mitra *global technology* untuk memberikan sertifikasi internasional kepada peserta yang memenuhi syarat. Selain itu di tahun 2020, DTS bekerjasama dengan BUMN ternama untuk melakukan pemagangan setelah mengikuti salah satu tema pelatihan.

Beberapa akademi yang diminati oleh peserta, pada akhirnya dibuka dalam beberapa *batch* pelatihan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka *upgrading* dan *upskilling* selama masa pandemi. Pandemi bukan hambatan agar tetap #MakinJagoDigital. Meski berlangsung secara daring, setiap peserta dapat berpartisipasi aktif. Tercatat sebanyak 102.313 orang mendaftarkan akun pada laman digitalent.kominfo.go.id. Dari jumlah tersebut, 70.660 di antaranya lanjut meregistrasikan diri pada akademi yang diminati dan mengikuti tahapan seleksi sebagai peserta.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sampai dengan 31 Desember 2020, sebanyak 58.116 Peserta telah mengikuti program *Digital Talent Scholarship* (DTS), perhitungan realisasi dari Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Peserta DTS Tahun 2020} = 58.116 \text{ Peserta DTS}}{\sum \text{Target Peserta DTS Tahun 2020} = 45.000 \text{ Peserta DTS}} \times 100 = 129,15\%$$

Sehingga perhitungan prosentase capaian yang didapatkan pada tahun 2020 didapatkan dengan cara membandingkan antara realisasi 58.116 Peserta DTS dengan target 45.000 Peserta DTS. Rincian peserta dari setiap akademi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rincian Peserta DTS dari Setiap Akademi

Akademi	Peserta	Certified
OA	22.345	11.035
VSGA	4.003	2.815
FGA	4.081	3.149
TA	1.536	1.081
RDA	957	697
DEA	25.194	16.982
Total	58.116	35.759

Dari jumlah total peserta yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan sertifikasi dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS), jumlah tersebut terdiri atas peserta dari masyarakat umum dan ASN. Peserta yang berasal dari ASN tercatat dapat berpartisipasi pada 2 (dua) akademi yakni *Regional Development Academy* (RDA) dan *Online Academy* (OA).

Untuk rincian peserta ASN dari RDA dapat dilihat pada tabel di atas karena seluruh peserta RDA adalah ASN. Sementara itu, peserta dari kalangan ASN pada OA adalah 4.261 peserta dengan 2.344 peserta di antaranya *certified* (55%). Dari jumlah tersebut, 142 orang dinyatakan berhak sertifikasi global (tidak seluruh skema pelatihan pada OA memungkinkan berlanjut ke sertifikasi global). Namun hanya sekitar 30 peserta yang bersedia melanjutkan sertifikasi global. Sebanyak 16 peserta yang bersedia melanjutkan, berhasil mendapatkan sertifikasi global.

Selain itu, pelatihan SDM Vokasi bidang Kominfo juga turut berkontribusi pada peningkatan kompetensi talenta digital pada level menengah bagi peserta dengan latar belakang pendidikan SMK dengan pemberian pelatihan SKKNI dengan KKNi level 3 dan 4. Perbedaan tingkat KKNi ini yang membedakan dengan akademi VSGA yang memberikan pelatihan *level up* dengan level KKNi 4 dan 5. Dari target 2.500 peserta dengan penyelenggaraan di 10 UPT Badan Litbang SDM bagi peserta di wilayah kerja masing-masing, capaian pelatihan SDM Vokasi adalah sebanyak 3.071 peserta dengan realisasi peserta tersertifikat sebanyak 1.802 dari total 2.566 peserta yang mengikuti sertifikasi. Sehingga, prosentase tingkat kelulusan/kompetensi pelatihan SDM Vokasi bidang Kominfo adalah sebesar 70,22%. Target awal prosentase kompetensi/kelulusan adalah 70%. Oleh karena itu, capaian ini juga melampaui target dengan prosentase sebesar 102,97%. Capaian ini patut diapresiasi lebih karena baru mulai dilaksanakan bulan September 2020 mengingat tidak semua tema pelatihan dapat diselenggarakan secara daring.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Sumber dana program *Digital Talent Scholarship* Tahun 2020 berasal dari kombinasi Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar 3.4
Rincian Peserta DTS dari Setiap Akademi



Realisasi anggaran program ini adalah Rp 67.487.983.762. Dengan kata lain, terdapat pagu Rp 19.047.364.238 yang tidak dapat terserap. Namun, realisasi anggaran tidak menggambarkan capaian kinerja yang berhasil diupayakan. Diskresi untuk melakukan *shifting* metode pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi DTS dari luring menjadi daring menghemat anggaran dari berbagai sisi. Meskipun realisasi anggaran hanya mencapai 77,99% karena efisiensi dan tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan secara luring, namun realisasi kinerja program ini mampu melampaui target awal dengan prosentase sebesar 129,15%.

Faktor Pendukung

- Diskresi pimpinan yang cepat tanggap mengatasi kendala akibat terjadinya pandemi Covid-19, berpengaruh besar pada capaian akhir untuk IKSK ini. Kebijakan mengalihkan metode pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dari luring menjadi daring diambil untuk mengantisipasi berlakunya PSBB dan sistem *flexible working space* di berbagai daerah. Sejak diberlakukan pada 16 Maret di Jakarta, daerah lain turut memberlakukan pembatasan tersebut untuk menghindari penyebaran virus. Akibatnya, pelaksanaan pelatihan sempat tertunda selama 2 pekan untuk menggodok bentuk pola pelaksanaan yang paling ideal. Akhirnya diputuskan akademi DEA turut dilaksanakan secara luring dimulai pada bulan April.
- Peralihan metode pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tidak meninggalkan tujuan dan fokus utama penyelenggaraan program/kegiatan yang menjadi prioritas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM ini. Peralihan ini justru menjadi tantangan yang memicu transformasi digital dan peningkatan literasi digital dengan jauh lebih masif dengan memanfaatkan *platform* rapat daring untuk menyampaikan materi pelatihan begitu juga dengan proses sertifikasi.

Faktor Penghambat/Kendala

- Pandemi Covid-19
- Kebijakan pembatasan pergerakan sosial (PSBB)
- Kesulitan dalam pelaksanaan pelatihan/sertifikasi apabila dilaksanakan secara daring antara lain:
 - beberapa skema pelatihan yang melibatkan penggunaan *hardware* (contoh: pelatihan jaringan) sehingga pelatihan tidak hanya membutuhkan PC/laptop dan koneksi internet namun juga *hardware* dan tidak dapat dilaksanakan secara daring;
 - koneksi jaringan internet yang tidak stabil di waktu-waktu dan daerah tertentu;
 - keterbatasan skema ujian daring pada tiap LSP;
 - belum semua skema yang dilatihkan/sertifikasi, sudah punya ijin skema daring dari BNSP; dan
 - sebagian besar tema pelatihan lebih optimal apabila diselenggarakan secara tatap muka karena membutuhkan pendampingan.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Semula, metode pelatihan dan sertifikasi pada semua akademi DTS dilaksanakan secara luring selain *Online Academy* (OA). Target peserta OA adalah 12.500 atau sekitar 25% dari total target peserta DTS. Namun, untuk beradaptasi dengan pandemi Covid19 dan kebijakan PSBB di berbagai daerah, metode pelatihan dan sertifikasi DTS tahun 2020 beralih haluan sehingga hanya sekitar 5,60% pelatihan/sertifikasi dilaksanakan secara luring. Sisanya, yakni sekitar 94,4% pelatihan/sertifikasi dilaksanakan secara daring.
- Tidak semua akademi dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara luring juga tetap dilakukan untuk turut serta mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memperhatikan izin Pemda setempat dan status zona daerah tersebut. Pelatihan secara luring hanya dapat dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam zona kuning dan hijau. Dalam pelaksanaannya, peserta yang hadir secara tatap muka juga diwajibkan untuk mengikuti *rapid test* dan protokol kesehatan tetap tidak boleh diabaikan untuk menghindari kemungkinan penyebaran virus di lokasi pelatihan.
- Awalnya, tidak ada rencana pelaksanaan FGA dan VSGA secara daring karena seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi memerlukan standar tertentu yang harus dipenuhi. Dengan tantangan harus terpenuhinya target program/kegiatan sekaligus sebagai kontribusi atas upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, pada Triwulan III/September 2020, pelaksanaan FGA dan VSGA dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan FGA dan VSGA terpaksa mundur hingga kuartal ke III tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan tatanan baru pada September 2020 dengan protokol kesehatan.

Rekomendasi

- Dengan prediksi pandemi yang masih akan berlangsung di tahun 2021, pelatihan dan sertifikasi DTS masih tetap akan diselenggarakan secara *hybrid* yakni perpaduan antara luring dan daring. Bagi akademi yang masih memungkinkan melaksanakan pelatihan/sertifikasi secara daring, akan segera dilaksanakan secara daring sejak awal tahun 2021. Sebaliknya, apabila akademi tertentu masih belum memungkinkan dilakukan secara daring, maka seperti tahun sebelumnya, akan dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan dan status zona lokasi yang akan dituju.
- Dimulainya vaksin Covid-19 pada Januari-Februari 2021 dimana proses penyuntikan pertamanya melibatkan presiden, sejumlah menteri, dokter, perwakilan dari berbagai profesi, tokoh agama, *influencer*, pekerja di bidang pelayanan public dan pedagang diharapkan menjadi titik cerah penanggulangan pandemi di tanah air. Dengan dipelopori pesohor nasional diharapkan mengurangi keraguan yang sempat mencuat di masyarakat. Di balik itu, pelaksanaan DTS diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional sesuai target Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

IKSP 2.2. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy* yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.

Tabel 3.12

IKSP 2.2. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy* yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.

SP.2 Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.				
Indikator		Target	Capaian	%
2	Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.	20%	33,7%	168,5%

Seperti tahun sebelumnya, DTS 2020 juga melibatkan mitra *global technology* untuk memberikan sertifikasi internasional kepada peserta yang memenuhi syarat. Selain itu di tahun 2020, DTS bekerjasama dengan BUMN ternama untuk melakukan pemagangan setelah mengikuti salah satu tema pelatihan.

Beberapa akademi yang diminati oleh peserta, pada akhirnya dibuka dalam beberapa *batch* pelatihan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka *upgrading* dan *upskilling* selama masa pandemi. Pandemi bukan hambatan agar tetap **#MakinJagoDigital**. Meski berlangsung secara daring, setiap peserta dapat berpartisipasi aktif. Tercatat sebanyak 102.313 orang mendaftarkan akun pada laman digitalent.kominfo.go.id. Dari jumlah tersebut, 70.660 di antaranya lanjut mendaftarkan diri pada akademi yang diminati dan mengikuti tahapan seleksi sebagai peserta.

Dan pada akhir pelatihan, peserta juga didampingi melalui kegiatan pasca pelatihan dengan memberikan bekal pelatihan membangun *personal branding*, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, belajar menyusun Curriculum Vitae, trik menghadapi *interview* pekerjaan, tes psikologi untuk menemukan minat dan bakat. Program pasca pelatihan hanya ditujukan bagi alumni *Fresh Graduate Academy*, *Vocational School Graduate Academy* dan *Thematic Academy*.

Alumni DTS merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan dan program pasca pelatihan tersebut terutama bagi peserta yang pernah mengalami PHK untuk mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat sekaligus menambah portofolio pada CV dan juga bagi *fresh graduate* yang mempersiapkan diri untuk *interview* pekerjaan pertamanya. Dengan kondisi tahun 2020 yang membawa penduduk di seluruh dunia memasuki tatanan normal baru, pandemi tidak melumpuhkan minat masyarakat untuk **#MakinJagoDigital**.

Tidak berhenti sampai disitu, DTS juga sekaligus memfasilitasi pertemuan dengan penyedia kerja melalui aplikasi SIMONAS. SIMONAS adalah *platform job portal* yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diluncurkan pada September 2019. Database peserta Simonas adalah peserta lulusan dari program *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kominfo RI.

SIMONAS diciptakan untuk dapat menghubungkan antara pencari kerja dengan industri yang membutuhkan talenta digital. Industri dapat membuka lowongan pekerjaan ataupun pemagangan sebanyak apapun secara gratis. SIMONAS juga dilengkapi oleh berbagai fitur yang memudahkan industri dalam mencari tenaga kerja. Begitupun para pencari kerja dimudahkan dengan banyaknya pilihan lowongan pekerjaan yang ada.

Dengan peluncuran kembali (*re-launching*) pada 15 Desember 2020, SIMONAS hadir dengan fitur-fitur yang diperbaharui untuk memudahkan peserta dengan keunggulan:

Gambar 3.5
Pembaruan SIMONAS



Tabel 3.13
Survei Alumni DTS

Status	FGA		VSGA		Total		Keterangan
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
Terserap	1.681	46 %	985	23%	2.666	33,7%	Bekerja, magang, freelance, dan wirausaha
Melanjutkan Pendidikan	1.010	27 %	2.680	63%	3.690	46.6%	Perguruan tinggi (formal) atau pelatihan (pendidikan informal)
Mencari kerja	993	27 %	571	13%	1.564	19,70%	
TOTAL	3.684		4236		7.920		

* Berdasarkan hasil survey dari 7.920 alumni yang merespon

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Dari 6 akademi pada pelatihan dan sertifikasi DTS, 2 akademi di antaranya dipersiapkan dan diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari angkatan kerja muda yang sedang mencari pekerjaan maupun berniat meningkatkan kapasitasnya di bidang TIK yakni akademi FGA dan VSGA. Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, selain memberikan pelatihan tematik, DTS juga turut memfasilitasi pertemuan dengan industri dan melakukan *tracing* alumni DTS dengan menyebarkan kuesioner secara daring. Pertanyaan kuesioner diarahkan untuk mengidentifikasi alumni yang berstatus bekerja, mencari pekerjaan, magang, kuliah, *freelance*, melanjutkan pelatihan, dan wirausaha. Alumni yang termasuk kategori terserap industri adalah alumni yang bekerja, magang, *freelance*, dan wirausaha. Sementara alumni yang masuk kategori melanjutkan pendidikan adalah alumni yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi (formal) atau pelatihan (pendidikan informal).

Semula target 20% ditetapkan untuk melanjutkan kinerja Indikator yang sama pada tahun 2019, namun saat itu sebagai tahun pertama penyelenggaraan dengan pelaksanaan multi akademi, capaian indikator ini adalah 19,05% peserta tersertifikasi terserap industri. Selanjutnya, secara berkesinambungan survei disebarkan kepada alumni DTS hingga tercapai sebanyak 33,7% alumni berhasil mendapatkan pekerjaan, magang, *freelance*, dan berwirausaha dengan rincian alumni FGA sebanyak 1.681 (46%) dan alumni VSGA sebanyak 985 orang (23%). Sementara itu 46,6% alumni lainnya memilih untuk melanjutkan pendidikan baik di sektor formal maupun informal sebagai upaya *upgrading* dan *upskilling* potensi SDM digital.

Perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alumni DTS Tersertifikasi Terserap Industri} = 2.666 \text{ alumni}}{\sum \text{Alumni DTS Tersertifikasi Responden Survei} = 7.920 \text{ alumni}} \times 100\% = 33,67\%$$

Apabila dibandingkan dengan target awal penyerapan alumni FGA dan VSGA sebanyak 20%, maka perhitungan prosentase capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alumni DTS Tersertifikasi Terserap Industri} = 33,67\%}{\sum \text{Alumni DTS Tersertifikasi Responden Survei} = 20\%} \times 100\% = 168,35\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk kedua akademi ini adalah sebesar Rp 31.325.669.940 dari pagu sebesar Rp 35.217.212.000 (88,95%). Dilihat dari perbandingan realisasi anggaran dan fisik, realisasi capaian kedua akademi tersebut masih terlihat paralel meskipun realisasi anggarannya tidak mencapai 90%.

Anggaran di atas termasuk pada anggaran besar DTS yang bersumber dari kombinasi Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kominfo seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Faktor Pendukung

- Kerja sama dengan BUMN ternama sangat membantu pencapaian target indicator ini. Dengan tersalurkannya alumni DTS FGA dan VSGA masuk ke dunia kerja, mempermudah alumni mengakses pekerjaan maupun kesempatan magang. Dari testimoni alumni pun, salah satu BUMN tersebut bersedia menerima peserta magang dari alumni DTS untuk dipekerjakan menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan performa yang prima dan sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai yang belum ditempati.
- Selain itu, *platform* Simonas juga turut berperan besar membantu menyalurkan informasi dan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, maka:

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24%.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 7,07%, meningkat 1,84% dibanding Agustus 2019.
- Penduduk bekerja 128,45 juta orang, turun 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,23%). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,30%).
- Sebanyak 77,68 juta orang (60,47%) bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59% dibanding Agustus 2019.
- Dalam setahun terakhir, prosentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 3,77% dan 3,42%.
- Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).¹²

¹² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

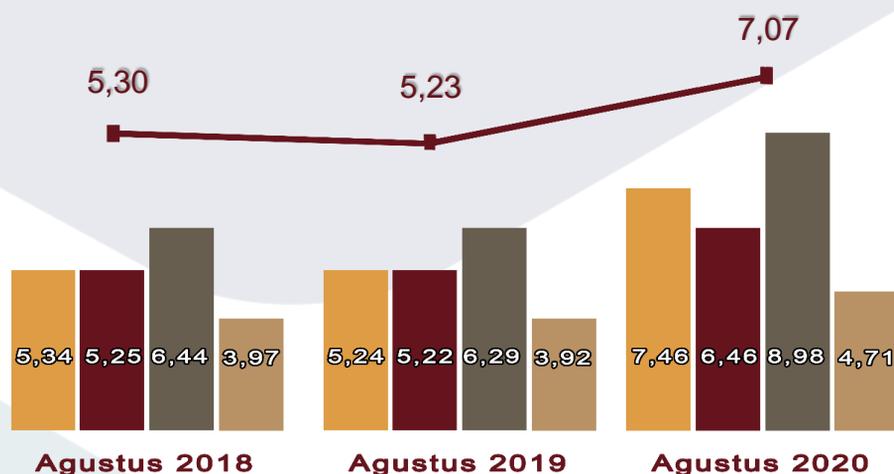
Gambar 3.6

Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020

KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA AGUSTUS 2020

Berita Resmi Statistik No. 86/11/Th. XXIII, 5 November 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2018-Agustus 2020



TPT laki-laki dan TPT perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi



Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar **14,28 Persen**



Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020



Mengambil sampling kota metropolitan, BPS Jakarta dalam infografis press release di samping menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95% atau setara 572.780 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41% atau bertambah 233.378 orang. Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena perusahaannya terdampak Covid19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selama periode pandemi, sektor formal kehilangan 453.295 pekerja tetapi hanya 259.597 pekerja mampu diserap oleh sektor informal. Akibatnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan. Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid19.¹³

Dari angka-angka di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh rendahnya ketersediaan pekerjaan di masa pandemi karena banyaknya sektor terdampak namun jumlah angkatan kerja justru meningkat. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan bagi pencari kerja, namun juga banyak pegawai terkena *lay off* terutama di industri terkena imbas pandemi. Oleh karenanya, persaingan dalam bursa kerja semakin tinggi dan tidak dapat dihindari. Posisi yang lebih disulitkan adalah *fresh graduate* yang belum memiliki pengalaman kerja karena mayoritas peluang lapangan pekerjaan yang masih memungkinkan di masa seperti ini adalah untuk pekerja profesional dengan keahlian dan pengalaman spesifik.

Dampak ini juga dirasakan bagi alumni pelatihan DTS sehingga capaian di atas merupakan realisasi maksimal yang dapat tercapai. Capaian tersebut juga belum tentu mewakili realisasi riil indikator ini karena prosentase di atas merupakan perhitungan dari alumni DTS yang merespon kuesioner sementara sisanya belum merespon kuesioner untuk dapat dikategorisasikan sebagai terserap, melanjutkan pendidikan, ataupun mencari kerja.

¹³ <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/493/dampak-covid-19--pengangguran-dki-jakarta-tembus-dua-digit.html>

Gambar 3.7

Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2020

KEADAAN KETENAGAKERJAAN DKI JAKARTA AGUSTUS 2020

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) AGUSTUS 2020

10,95% ▲ 4,41%

*Dibandingkan Agustus 2019



DAMPAK COVID-19
TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA

175.890 orang
menjadi pengangguran

77.336 orang
sementara tidak bekerja

40.151 orang
menjadi *inactivity*

1.673.028 orang
mengalami pengurangan
jam kerja

*keterangan:
Terjadi selama Februari - Agustus 2020
dan disebabkan karena Covid-19*



Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Kerja sama dengan industri, BUMN serta asosiasi semakin gencar dijalin untuk keberlangsungan pelatihan/sertifikasi sekaligus penyaluran alumni peserta DTS kepada industri baik untuk magang, bekerja maupun berwirausaha. Untuk itu, sejak pertama kali pelaksanaannya tahun 2018 hingga tahun 2020, pelaksanaan DTS menggandeng beberapa mitra yakni:

Gambar 3.8
Mitra Kerja Sama DTS 2018-2020



- Peningkatan kapasitas aplikasi SIMONAS dengan *re-launching* pada 15 Desember 2020 lalu sekaligus menjadi penanda penambahan fitur baru, mulai dari fitur update data pribadi, pencarian pekerjaan berdasarkan gaji, serta kemudahan akses melalui platform Android dan iOS. Pengkategorian jenis pekerjaan, bertujuan memudahkan pencari pekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan. Sesuai dengan semangat Program DTS yang mencetak talenta digital unggul, nantinya juga akan mendekatkan para talenta dengan industri digital. Untuk melihat daftar mitra DTS, dapat diakses pada laman: <https://simonas.kominfo.go.id/company>

- Program DTS tidak hanya memberikan pelatihan hard-skill tetapi juga soft-skills seperti profiling melalui DISC Test, personal branding, serta pemberian bahasa Inggris melalui kelompok kerja (Pokja) pascapelatihan. Setelah re-launching platform job portal Simonas 2020, para peserta *Fresh Graduate Academy (FGA)*, *Vocational School Graduate Academy (VSGA)* dan *Thematic Academy (TA)* akan memanfaatkan dan merasakan Simonas untuk melamar pekerjaan maupun magang dari lowongan yang dibuka oleh mitra industri Kemkominfo.¹⁴

Rekomendasi

Kolaborasi antara kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media yang disebut penta helix berpengaruh besar bagi pencapaian kinerja maksimal untuk indikator ini. Antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan berkorelasi sehingga mengharuskan kelimanya untuk saling berkolaborasi. Pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai penerima manfaat, dunia usaha sebagai wadah menyalurkan pencari kerja potensial, dan media sebagai platform diseminasi informasi yang diharapkan menjadi katalisator masing-masing berperan sesuai porsinya.

IKSP 2.3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

Tabel 3.14

IKSP 2.3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

SP 2. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.				
Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Capaian	%
1	Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%	95,5%	106,11%

¹⁴ https://kominfo.go.id/content/detail/31532/kemkominfo-tambah-fitur-aplikasi-simonas/0/sorotan_media

Proses penyelenggaraan diklat berorientasi pada hasil/*outcome* bukan pada level output saja. Indikator ini merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan diklat, dimana tidak diukur hanya dari sisi kuantitatif jumlah peserta namun juga dari kualitas kompetensi alumni diklat. Peserta diklat dituntut untuk memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti kegiatan diklat, yang diukur dari peningkatan nilai post-test yang dibandingkan dengan *pre-test*.

Untuk mencapai indikator tersebut Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang sebagai pengampu program prioritas ini berupaya meningkatkan mutu/kualitas pesertanya dengan memberikan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang bermutu, pengajar yang berkompeten, dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar Metode pengukurannya adalah dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta. Jumlah peserta yang mengikuti diklat manajerial, teknis, dan fungsional berjumlah 748 orang. Namun tidak semua jenis diklat menyertakan ujian untuk menentukan kelulusan/kompetensi peserta diklat. Terdapat juga diklat yang bersifat *completion*.

Peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang manajerial, teknis, dan fungsional di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diukur dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta.

Kualifikasi kelulusan berbeda setiap jenis diklat sesuai dengan peraturan dan kurikulum diklatnya, berikut adalah kualifikasi diklat yang diselenggarakan pada tahun 2020:

- Kualifikasi kelulusan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas Tk Keterampilan dan Keahlian, sesuai dengan Permenkominfo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah:

Tabel 3.15
Kualifikasi Kelulusan Diklat Tahun 2020

Kualifikasi	Skor
Sangat Memuaskan	95 – 100
Memuaskan	90 – 94,9
Baik Sekali	80 – 89,9
Baik	70 – 79,9
Kurang	< 70

Peserta diklat yang memperoleh kualifikasi kurang dinyatakan Tidak Lulus.

- Kelulusan *Workshop* Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator (PKA) ditentukan oleh unit penyelenggara, dalam hal ini Pusdiklat bekerjasama dengan 8 Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara.

Tabel 3.16
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Rekap Realisasi Output Diklat Aparatur Tahun 2020				
	Peserta Pelatihan	Peserta Ujian	Peserta Kompeten/ Lulus	% Kelulusan (Peserta Lulus/ Peserta Ujian)
PUSDIKLAT				
Diklat Manajerial	12	12	10	83,33%
Diklat Fungsional	19	19	19	100%
Diklat Teknis	131	131	130	99,24%
	162	162	159	98,15%
BPPTIK CIKARANG				
Diklat Teknis	586	482	456	94,61%
TOTAL	748	644	615	95,50%

Perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Peserta Diklat Aparatur Lulus/Kompeten} = 615 \text{ peserta}}{\sum \text{Peserta Diklat Aparatur Mengikuti Ujian} = 644 \text{ peserta}} \times 100\% = 95,50\%$$

Dari perhitungan di atas, maka prosentase capaian indicator ini adalah:

$$\frac{\sum \text{Prosentase Kelulusan Peserta Diklat Aparatur} = 95,50\%}{\sum \text{Target Prosentase Kelulusan Peserta Diklat Aparatur} = 90\%} \times 100\% = 106,11\%$$

Untuk indikator ini, target kelulusan peserta diklat aparatur adalah sebesar 90%. Pada pelaksanaan tahun 2020, Badan Litbang SDM mampu melampaui target semula. Dari 644 peserta ujian, 615 peserta di antaranya atau sekitar 95,5% berhasil dinyatakan lulus/kompeten sehingga performa indikator ini mencapai 106,11%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Sumber dana program Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis di Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang Tahun 2020 berasal dari kombinasi Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.17
Sumber Dana Program Diklat Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang Tahun 2020

RM	8.289.812.000
PNBP	1.762.690.000
Total	10.052.502.000

Realisasi anggaran program ini adalah Rp 8.632.195.108 (86%). Dengan kata lain, terdapat pagu Rp 1.420.306.892 yang tidak dapat terserap.

Faktor Pendukung

- Meskipun realisasi anggaran program ini hanya sekitar 86%, namun capaian realisasi output ini sekitar 106,11% sehingga melampaui target yang semula ditetapkan di awal. Hal ini karena di BPPTIK Cikarang telah menyelesaikan target diklat luring pada bulan Februari sebelum berlakunya kebijakan PSBB.

Faktor Penghambat/Kendala

- Realisasi belanja barang di Pusdiklat hanya mencapai 68,93% dari pagu, terutama dari sumber anggaran PNBP. Dengan alasan situasi kondisi Pandemi Covid-19 pelatihan Tatap Muka tidak dapat dilakukan sehingga harus dilaksanakan secara Online, Pusdiklat belum dapat menyelenggarakan dilat Pranata Humas (PH) secara Online dikarenakan belum ada kurikulum dan modul untuk pelatihan berbasis online. Sesuai arahan Peraturan Menteri tentang JFT PH, kewenangan kurikulum dan modul ada di Ditjen IKP. Oleh karena itu, selama belum ada peraturan yang mengakomodir pelaksanaan diklat PH versi daring maka Pusdiklat tidak dapat menyelenggarakan diklat PH.

- Untuk pelatihan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP PNBPN) belum dapat dijalankan karena pola tarif yang belum sesuai dan tidak mengakomodir pola pelatihan secara daring sehingga apabila dilaksanakan akan dikhawatirkan menyalahi peraturan dan menjadi Temuan di kemudian hari. Hal ini dikarenakan tarif yang dimuat pada PP PNBPN tersebut termasuk menampung biaya sewa kamar, ruangan/kelas/auditorium, penggunaan alat dan bahan serta peralatan yang dikenakan tarif sewa tergantung penggunaan (per unit/harian/jam, dll) serta biaya konsumsi, biaya transport pengajar, dan lain sebagainya. Sementara, apabila dilaksanakan secara daring, otomatis banyak biaya yang terpengkas karena tidak digunakan. Namun, nominal tarif yang terdapat pada PP PNBPN merupakan nilai yang tidak dapat ditambah atau dikurangi besarnya sehingga tidak fleksibel untuk dilakukan perubahan metode pelaksanaan tanpa payung hukum tarif PNBPN untuk penyelenggaraan diklat daring.
- Beberapa pelatihan tidak optimal dilaksanakan daring, misalnya pelatihan terkait komunikasi ketika dilaksanakan daring kurang optimal. Sebagai contoh, pelatihan *public speaking* lebih optimal dilakukan secara luring karena pengajar perlu menilai posisi badan, *gesture* ketika berhadapan dengan orang banyak.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Rancangan PP PNBPN yang tengah disusun telah mengakomodir perihal tarif diklat secara daring. Sehingga diharapkan apabila PP PNBPN terbaru telah disahkan akan meningkatkan jumlah peserta diklat yang dapat diakomodir untuk dilaksanakan secara daring.
- Saat pelatihan dilaksanakan secara daring, yang peserta dapatkan adalah pelatihan dan sertifikasi. Untuk pelatihan luring tidak mendapatkan sertifikasi karena biayanya mencakup tarif transportasi pengajar. Sehingga komponen biaya yang tidak digunakan ketika daring dialihkan menjadi sertifikasi untuk pelatihan daring.

Rekomendasi

- Di RPP dan RPM PNBPN yang tengah disusun, akan memisahkan tarif antara pelatihan daring dan luring. Pada pelatihan luring dikenakan tarif 100%, sementara pada pelatihan daring dikenakan 90% dari tarif normal karena pada pelatihan daring tidak semua komponen pembiayaan terserap seperti misalnya konsumsi, pemeliharaan, transportasi pengajar, dll. Maka, penentuan tarif PNBPN akan mengakomodir metode pelaksanaan daring dan luring.

SP.3 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA BADAN LITBANG SDM

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.18
IKSP 3.1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM

IKSP 3.1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM				
Indikator		Target	Capaian	%
1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	76,5	91,71	120,67%

Berdasarkan hasil evaluasi internal Itjen atas penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM TA 2020 dari Nota Dinas Inspektur III Nomor 187/IJ.4/PW.01.06/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2020, hasil penilaian RB Badan Litbang SDM TA 2020 adalah sebagai berikut:

- Bobot Nilai Pemenuhan: 14,60
- Nilai Pemenuhan Badan Litbang SDM: 13,39.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan indicator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai Pemenuhan Badan Litbang SDM} = 13,39}{\sum \text{Bobot Nilai Pemenuhan} = 14,60} \times 100\% = 91,71\%$$

Prosentase capaian IKSP ini adalah 91,71% dengan membandingkan dari target awal IKSP ini yakni 76,5. Maka, capaian IKSP melebihi target yang semula ditetapkan dengan prosentase capaian sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai RB Badan Litbang SDM Tahun 2020} = 91,71}{\sum \text{Target Nilai RB Badan Litbang SDM Tahun 2020} = 76,5} \times 100\% = 119,88\%$$

Faktor Pendukung

- Komponen nilai pemenuhan pendukung nilai Badan Litbang SDM yang mendapatkan bobot nilai maksimal adalah:
 - Deregulasi kebijakan
 - Penataan dan Penguatan Organisasi
 - Penataan Tatalaksana
 - Penguatan Akuntabilitas

Faktor Penghambat/Kendala

- Komponen nilai pemenuhan yang belum mendapatkan bobot nilai maksimal adalah:
 - Manajemen Perubahan
 - Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Penguatan Pengawasan
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Tiap Pokja yang masih memiliki catatan perbaikan Tim Itjen hingga batas waktu penilaian oleh Tim Penilai Nasional PMPRB dari Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi

- 1) Pokja Manajemen Perubahan perlu memperbarui bukti dukung yang dilampirkan. Fokus perincian pada pokja ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi perlu menyampaikan bukti dukung yang terbaru yang menunjukkan bahwa tugas sudah dilaksanakan setiap tahun dan sesuai timeline.
 - b. Tim Reformasi Birokrasi perlu menyusun laporan monitoring dan evaluasi per setiap satuan waktu yang telah ditentukan.
 - c. Roadmap Reformasi Birokrasi perlu menyampaikan bukti dukung yang formal dimana dapat menunjukkan rencana kerja reformasi 2020.
 - d. Roadmap Reformasi Birokrasi perlu menyampaikan rencana kerja reformasi 2020 yang menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab.

- 2) Pokja Deregulasi Kebijakan perlu menyusun laporan atau dokumen progress report secara berkala yang dapat dievaluasi dan dipantau perkembangannya. Fokus perincian pada pokja ini adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu menyampaikan laporan berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang akan/ sudah ditetapkan. Analisis tersebut harus menyampaikan identifikasi, dan pemetaan terhadap kebijakan bilamana terdapat kebijakan yang menghambat, tidak harmonis, tidak sinkronisasi, perlu direvisi atau perlu dihapus.
 - b. Perlu menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi berkala atas progress atau kemajuan terhadap kebijakan yang akan/sudah ditetapkan per setiap satuan waktu yang telah ditentukan.

- 3) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi perlu memperbarui bukti dukung yang dilampirkan. Highlight atau fokus perincian pada pokja ini adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu menyampaikan laporan terhadap evaluasi kelembagaan yang dapat menunjukkan kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja.
 - b. Perlu menyampaikan laporan perbaikan atas upaya revisi kebijakan terhadap kebijakan yang menghambat atau tidak harmonis atau tidak sinkronisasi.
 - c. Perlu menyampaikan laporan yang dapat menunjukkan bahwa sudah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih tugas dan fungsi.

- 4) Pokja Penguatan Pengawasan perlu memperbarui dan melengkapi bukti dukung yang dilampirkan. Highlight atau fokus perincian pada pokja ini adalah:
 - a. Perlu menyampaikan laporan berkala dan terbarukan terhadap unit gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, penanganan benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas.
 - b. Perlu menyampaikan bukti dukung yang dapat menunjukkan telah dilakukannya sosialisasi pelaksanaan unit-unit kerja pokja penguatan pengawasan tersebut secara berkala per setiap satuan waktu yang telah ditetapkan.

- 5) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan perlu memperbarui dan melengkapi bukti dukung yang dilampirkan. Highlight atau fokus perincian pada pokja ini adalah sebagai berikut:
- Perlu menyampaikan bukti dukung yang dapat menunjukkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan.
 - Perlu menyampaikan bukti dukung yang dapat menunjukkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
 - Perlu menyampaikan bukti dukung yang dapat menunjukkan bahwa telah terdapat inovasi pelayanan.
 - Perlu menyampaikan bukti dukung yang dapat menunjukkan bahwa terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan.
 - Perlu menyampaikan bukti dukung yang dapat menunjukkan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

IKSP 3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM

Tabel 3.19
IKSP 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM				
Indikator		Target	Capaian	%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	67	67,20	100,3%

Nilai sementara berdasarkan lampiran hasil evaluasi internal Itjen berdasarkan lampiran Nota Dinas Inspektur IV kepada Biro Perencanaan Nomor 179/IJ.5/PW.04.05/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika, hasil evaluasi internal Itjen adalah **67,20**. Pada target awal Perjanjian Kinerja IKSP ini adalah nilai AKIP 67, ternyata capaian Badan Litbang SDM dapat melampaui target awal yang ditetapkan, maka prosentase capaian IKSP ini adalah sebesar 100,3%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan prosentase capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai AKIP Badan Litbang SDM Tahun 2020} = 67,20}{\sum \text{Target Nilai AKIP Badan Litbang SDM Tahun 2020} = 67} \times 100\% = 100,3\%$$

Prosentase capaian IKSP ini adalah 100,3% dari skor target yang semula ditetapkan sebesar 67. Sementara, target awal IKSP ini adalah nilai AKIP 67. Maka, capaian IKSP melebihi target yang semula ditetapkan. Nilai 67 masuk ke kategori B (Baik) dimana penilaian Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian nilai per komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rincian Nilai Perkomponen

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	14,27
2.	Pengukuran Kinerja	25%	18,85
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,33
4.	Evaluasi Internal	10%	5,88
5.	Capaian Kinerja	20%	17,87
	Total	100%	67,20

Tabel 3.21

IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 (1)

No	Komponen	Bobot	Nilai	Area of Improvement
1.	Perencanaan Kinerja	30%	14,27	Memformalkan Renstra Eselon I
2.	Pengukuran Kinerja	25%	18,85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian mekanisme pengumpulan data kinerja 2. Menyelaraskan IKU PK dengan IKU Renstra 3. Memetakan keselarasan PK Eselon I sampai setara Eselon IV 4. Menerapkan dan mendokumentasikan kegiatan <i>reward and punishment</i> 5. Pendokumentasian kegiatan reвью IKU
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,33	-
4.	Evaluasi Internal	10%	5,88	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian monitoring Rencana Aksi 2. Pendokumentasian Evaluasi Rencana Aksi 3. Pendokumentasian Tindak Lanjut Evaluasi
5.	Capaian Kinerja	20%	17,87	-
	Total	100%	67,20	

Tabel 3.22

IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 (2)

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM				
Indikator		Target	Capaian	%
1	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019	1%	0.013%	100%

Temuan hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Badan Litbang SDM ditemukan di satuan kerja STMM Yogyakarta sebesar Rp 46.232.182 yakni kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi rehabilitasi gedung studio C STMM Yogyakarta. Sehingga prosentase temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BLSDM TA 2019 adalah sebesar 0.013% dari total realisasi anggaran BLSDM TA 2019.

Kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada kas negara dalam sekali pembayaran pada Juli 2020. Melalui Nota Dinas Sekretaris BLSDM kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 604/BLSDM.1/PW.03.07/07/2020 tgl 07 Juli 2020 perihal Penyampaian bukti setor pengembalian ke Kas Negara atas TLHP LK 2019 tahun 2020, kami telah melaporkan perihal pengembalian sebesar Rp 46.232.182 tersebut.

Apabila dibandingkan dengan total realisasi anggaran TA 2019 sebesar Rp 354.473.239.980, maka prosentase temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 adalah sebesar 0,013%. Sementara itu, target semula IKSP ini adalah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK adalah 1%. Karena polarisasi IKSP ini adalah Minimize dimana semakin kecil capaian dinilai menjadi semakin baik, maka prosentase capaian IKSP ini mencapai sesuai target awal yakni 100%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Temuan BPK pada Badan Litbang SDM Tahun 2019} = \text{Rp } 46.232.182}{\sum \text{Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019} = \text{Rp } 354.473.239.980} \times 100 = 0,013\%$$

Dengan target awal Temuan Hasil Pemeriksaan BPK adalah $\leq 1\%$. Dengan polarisasi minimize (semakin kecil dari target semakin baik), maka prosentase IKSP ini mencapai 100%.

IKSP 3.4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN

Tabel 3.23

IKSP 3.4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM				
Indikator		Target	Capaian	%
1	Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN	a. Thn.	a. Thn.	100%
		Berjalan:	Berjalan:	
		70%	100%	
		b. Thn.	b. Thn.	
Sebelumn	Sebelumn			
ya: 30%	ya: 100%			

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

- Tahun berjalan

Berkaitan dengan IKSP 3.3 di atas, tindak lanjut hasil temuan tahun 2019 sebesar Rp 46.232.182 pada satuan kerja STMM Yogyakarta telah dikembalikan kepada kas negara dan dan selesai 100% pada bulan Juli 2020.

Perhitungan indicator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penyelesaian TL Temuan BPK pada Badan Litbang SDM Tahun 2019} = 100\%}{\sum \text{Target Penyelesaian TL Temuan BPK pada Badan Litbang SDM Tahun 2019} = 70\%} \times 100\% = 100\%$$

- Tahun sebelumnya
Dari hasil pemeriksaan BPK, berikut data temuan sebelum tahun 2019 yang terdapat di lingkungan Badan Litbang SDM:

Tabel 3.24
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

No	Tahun	Judul LHP	Satker	TP	Status Temuan	Keterangan
1.	2010	Belanja Barang dan Modal 2009-2010	STMM	02.24	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan status selesai	Pengembalian ke kas negara Rp 10.310.720 (selesai)
2.	2010	Belanja Barang dan Modal 2009-2010	STMM	03.05	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan status selesai	Pengembalian ke kas negara Rp 16.679.524 (selesai)
3.	2010	LK 2009	BPSDMP Surabaya	15.2	Berdasarkan catatan Itjen perlu diajukan sebagai rekomendasi yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti kembali dan diverifikasi oleh Itjen	Tidak dapat ditindaklanjuti
4.	2017		BBPSMP Medan		Ganti rugi atas tidak ditemukannya 29 barang Inventaris monografi berdasarkan berita acara hasil inventaris monografi Nomor: 990.A/BBPSDMP-MDN/PL.04.01/XII/2018 Tgl 7 Des 2018	Pengembalian ke kas negara Rp 1.731.544
5.	2018	LHP LK 2016		15.02	Selesai	Surat pernyataan dari Plt. Kepala Bagian Program dan Perencanaan Sekretariat BLSDM dan Kepala Bagian UMUM Sekretariat BLSDM Tanggal 1 Februari 2018
6.	2019		STMM		Selesai	Pengembalian ke kas negara Rp 174.400.079 atas temuan kelebihan pembayaran pengadaan jasa konstruksi kepada PT Matra Karya pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pemancar STMM TA 2018 telah dilaporkan melalui Nota Dinas Sekretaris Badan Litbang SDM untuk Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1366/BLSDM.1/PW.03.07/11 /2019 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Bukti Setor Pengembalian ke Kas Negara atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Satker Badan Litbang SDM Kominfo

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa Badan Litbang SDM telah memenuhi tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal pada tahun anggaran tahun 2019 ke bawah, sehingga secara umum **100%** temuan pengawasan eksternal telah ditindaklanjuti oleh Badan Litbang SDM.

Perhitungan indicator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penyelesaian TL Temuan BPK Tahun Sebelumnya} = 100\%}{\sum \text{Target Penyelesaian TL Temuan BPK Tahun sebelumnya} = 30\%} \times 100\% = 100\%$$

IKSP 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM

Tabel 3.25

IKSP 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM

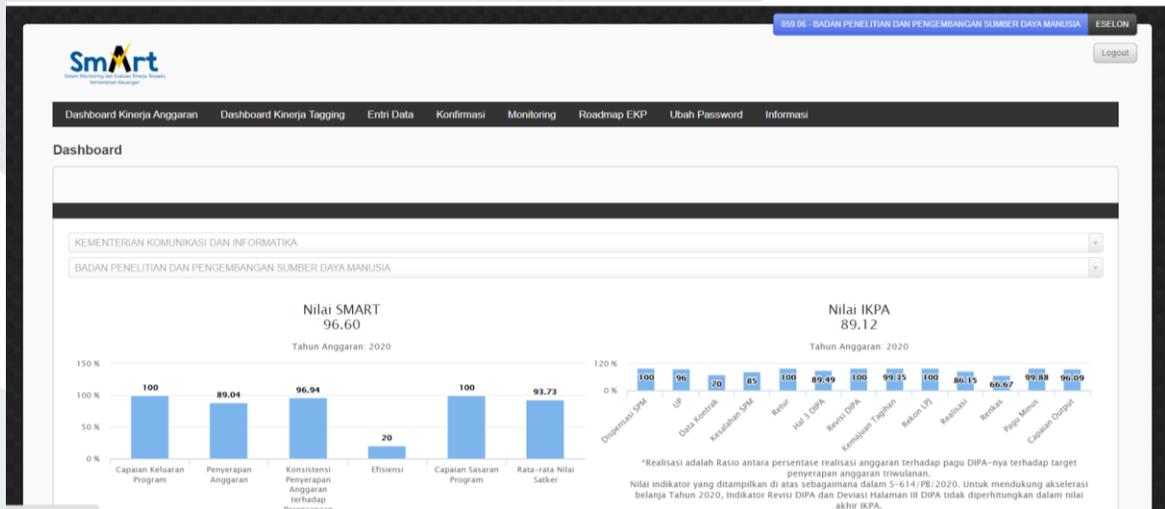
SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM				
	Indikator	Target	Capaian	%
5	Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM	86	94,02	109,33%

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM (unit eselon I) Tahun 2020 adalah **90,15** berdasarkan akses OMSPAN tanggal 19 Februari 2021. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki bobot 40%. Skor tersebut dipengaruhi oleh indikator penilaian yang terdiri atas 12 indikator, yakni:

1. Pengelolaan UP (bobot 10%);
2. Data Kontrak (bobot 15%);
3. Kesalahan/Pengembalian SPM (bobot 6%);
4. Retur SP2D (bobot 6%);
5. Halaman III DIPA (bobot 5%);
6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Penyelesaian Tagihan (bobot 15%);
8. Rekon LPJ Bendahara (bobot 5%);
9. Renkas/Perencanaan Kas (bobot 5%);
10. Realisasi Anggaran (bobot 20%);
11. Pagu Minus (bobot 4%); dan
12. Dispensasi SPM (bobot 4%).

Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga terdiri atas bobot nilai *dashboard* SMART. Berdasarkan akses aplikasi SMART DJA berdasarkan akses tanggal 19 Februari 2021, adalah 96,60. Bobot nilai evaluasi kinerja anggaran adalah 60%.

Gambar 3.9
Bobot Nilai SMART dan IKPA



Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Dari informasi di atas, perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2020 adalah:

Tabel 3.26
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Nilai Pencapaian Kinerja (SMART DJA)	Bobot (60%)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA OMSPAN)	Bobot (40%)	Nilai Kinerja Anggaran
96,6	57,96	90,15	36,06	94,02

Perhitungan indicator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM TA 2020} = 94,02}{\sum \text{Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM TA 2020} = 86} \times 100\% = 109,33\%$$

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran awal Badan Litbang SDM tahun 2020 sebesar Rp 522.287.750.000,-. Dalam perjalanan selama Tahun Anggaran 2020, telah diproses 5 (lima) kali proses revisi tingkat DJA baik itu penambahan maupun pemotongan, sehingga alokasi anggaran Badan Litbang SDM di akhir TA 2020 adalah menjadi Rp 304.801.530.000,- dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan ribuan):

Tabel 3.27
Alokasi Anggaran Badan Litbang SDM di Akhir TA 2020

No	Satuan Kerja	Pagu Per Jenis Belanja					Total Pagu
		51 Belanja Pegawai	51 Belanja Barang		53 Belanja Modal	57 Belanja Bantuan Sosial	
			OPS	Non OPS			
1	Badan Litbang SDM: <ul style="list-style-type: none"> • Set BLSDM • Puslitbang SDPPPI • Puslitbang APTIKA IKP • Pusbang Proserti • Pusediklat 	30.636.904.000	18.956.959.000	108.898.548.000	15.067.477.000	-	173.559.888.000
2	STMM Yogyakarta	26.288.255.000	7.187.205.000	12.011.437.000	13.002.524.000	-	58.489.421.000
3	BBPSDMP Medan	5.429.987.000	1.907.732.000	2.595.201.000	728.636.000	-	10.661.556.000
4	BBPSDMP Makassar	6.377.401.000	2.462.590.000	2.130.588.000	324.327.000	-	11.294.906.000
5	BPSDMP Jakarta	2.414.070.000	1.244.599.000	1.338.233.000	76.852.000	-	5.073.754.000
6	BPSDMP Bandung	4.294.314.000	993.190.000	1.264.186.000	373.875.000	-	6.925.565.000
7	BPSDMP Yogyakarta	4.138.927.000	823.517.000	1.037.430.000	428.269.000	-	6.428.143.000
8	BPSDMP Surabaya	3.577.058.000	1.296.953.000	1.744.764.000	368.606.000	-	6.987.381.000
9	BPSDMP Banjarmasin	2.254.361.000	923.928.000	978.276.000	149.140.000	-	4.305.705.000
10	BPSDMP Manado	2.644.835.000	1.778.312.000	670.754.000	618.213.000	-	5.712.114.000
11	BPPTIK	3.781.693.000	5.936.983.000	2.651.336.000	2.993.085.000	-	15.363.097.000
JUMLAH		91.837.805.000	43.511.968.000	135.320.753.000	34.131.004.000	-	304.801.530.000

Tabel 3.28
Pembagian Porsi Belanja Berdasarkan Sumber Dana (RM atau PNBP)

No	SATKER	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional (PNBP)	Belanja Non Operasional RM	Total Keseluruhan
1	Set. Badan Litbang SDM	30.636.904.000	18.556.919.000	-	24.962.182.000	74.156.005.000
2	Puslitbang Aptika dan IKP	-	-	-	1.786.044.000	1.786.044.000
3	Puslitbang SDPPPI	-	-	-	1.943.852.000	1.943.852.000
4	Pusbang Profesi dan Sertifikasi	-	-	71.264.000.000	15.271.348.000	86.535.348.000
5	Pusdiklat	-	-	1.456.768.000	7.681.871.000	9.138.639.000
6	STMM	26.288.255.000	7.187.205.000	16.178.900.000	8.835.061.000	58.489.421.000
7	BBPSDMP Medan	5.429.987.000	1.907.732.000	-	3.323.837.000	10.661.556.000
8	BBPSDMP Makassar	6.377.401.000	2.462.590.000	-	2.454.915.000	11.294.906.000
9	BPSDMP Jakarta	2.414.070.000	1.244.599.000	-	1.415.085.000	5.073.754.000
10	BPSDMP Bandung	4.294.314.000	993.190.000	-	1.638.061.000	6.925.565.000
11	BPSDMP Yogyakarta	4.138.927.000	823.517.000	-	1.465.699.000	6.428.143.000
12	BPSDMP Surabaya	3.577.058.000	1.296.953.000	-	2.113.370.000	6.987.381.000
13	BPSDMP Banjarmasin	2.254.361.000	923.928.000	-	1.127.416.000	4.305.705.000
14	BPSDMP Manado	2.644.835.000	1.778.312.000	-	1.288.967.000	5.712.114.000
15	BPPTIK Cikarang	3.781.693.000	5.936.983.000	305.922.000	5.338.499.000	15.363.097.000
	Total	91.837.805.000	43.111.928.000	89.205.590.000	80.646.207.000	304.801.530.000

Adapun proses revisi yang terjadi di tingkat Eselon 1 BLSDM secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kominfo tanggal 14 April 2020 Nomor:520/SJ.1/PR.01.01/04/2020 perihal Penyesuaian Postur Anggaran, maka dilakukan **pemotongan anggaran** untuk program terkait penanganan Covid-19, sejumlah Rp 150.454.274.000,-
Revisi tahap pertama ini juga termasuk proses penggunaan akun covid.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BLSDM tanggal 26 Mei 2020 Nomor:B-414/BLSDM.1/KU.01.02/05/2020 perihal Usulan Revisi Anggaran, maka dilakukan **pemotongan anggaran** alokasi pagu sumber PNB (yang berasal dari satker penghasil Ditjen SDPPI) sebesar Rp30.000.000.000,- dari Pusbang Proserti BLSDM ke Ditjen Aptika.
3. Revisi pada bulan Agustus 2020 atas **penambahan pagu** anggaran Belanja Pegawai atas kenaikan nilai Tunjangan Kinerja 80% berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemkominfo, yang diajukan permohonannya ke Kementerian Keuangan atas Nodin Menteri Kominfo Nomor:B-263/M.KOMINFO/KU.01.02/ 04/2020 perihal Permohonan untuk Memenuhi Kekurangan Belanja Pegawai Kemkominfo TA 2020, untuk lingkup E1 BLSDM menerima tambahan senilai Rp13.269.669.000,-
Proses revisi pada aplikasi SAKTI ke SatuDJA pada periode ini juga sekaligus proses pengalihan pagu dari anggaran belanja barang menjadi pagu belanja modal senilai Rp1.791.961.000,-
4. Pada bulan September 2020 terjadi revisi **pemotongan anggaran** sebesar Rp52.401.700.000,- dengan dasar Nota Dinas Kepala Badan Litbang SDM Nomor:80/BLSDM/PR.01.01/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Sisa Anggaran Program *Digital Talent Scholarship* Tahun 2020 yang bersumber dari PNB, untuk keperluan alokasi anggaran unit Eselon 1 lainnya menyesuaikan prioritas kebutuhan yang diatur oleh Sekretariat Jenderal.
Proses revisi pada aplikasi SAKTI ke SatuDJA pada periode ini juga sekaligus proses pengalihan pagu dari anggaran belanja barang menjadi pagu belanja modal senilai Rp200.000.000,-

5. Pada bulan Oktober 2020 terjadi revisi anggaran **penambahan pagu** sebesar Rp2.100.085.000,- yang didasarkan atas Nota Dinas Sekretaris BLSDM Nomor : B-1106A/BLSDM/KU.01.02/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran Badan Litbang SDM, dengan adanya pengesahan penerimaan hibah luar negeri dalam bentuk uang dari KOICA ke satker BPPTIK Cikarang.

Hibah untuk nama project "IT Management Support for ICT Training and Development Centre dengan nomor register 2TLBX4QA.

Nilai hibah yang diperoleh pada TA 2020 dari KOICA terbagi senilai Rp100.000.000,- untuk Belanja Barang, dan untuk Belanja Modal adalah senilai

Proses revisi pada aplikasi SAKTI ke SatuDJA pada periode ini juga sekaligus proses pengalihan pagu dari anggaran belanja barang menjadi pagu belanja modal senilai Rp200.000.000,-

Dari pagu akhir TA 2020 sebesar Rp 304.801.530.000,- realisasi anggaran Badan Litbang SDM adalah sebesar Rp 271.407.492.196,- sehingga prosentase capaian realisasi anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020 adalah sekitar 89,04% dengan rincian realisasi berikut:

Tabel 3.29
Capaian Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai (51)	91.837.805.000	87.790.302.998	95,59%
2	Barang (52)	178.832.866.000	149.748.811.863	83,74%
3	Modal (53)	34.130.859.000	33.868.377.335	99,23%
Jumlah		304.801.530.000	271.407.492.196	89,04%

Adapun rincian realisasi pada tiap satker/UPT dapat dilihat pada Lampiran 2: Kinerja Realisasi Satuan Kerja/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM TA 2020. Realisasi penggunaan anggaran di Badan Litbang SDM di TA 2020 tidak optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Realisasi belanja pegawai di satker Instansi Pusat Badan Litbang SDM hanya mencapai 92,80% dari pagu bahkan setelah penambahan dari BA BUN Kementerian Keuangan atas dasar Perpres Nomor 3 tahun 2020 tentang Kenaikan Tunjangan Kinerja Kementerian Kominfo 80%. Kekurangcermatan dalam proses penghitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai yang dipersiapkan, terkait adanya beberapa posisi jabatan struktural yang masih kosong (dirangkap) serta tidak tepatnya perhitungan dalam persiapan besarnya nilai fungsional atas beberapa proses perpindahan Pejabat struktural ke jabatan fungsional (Widyaiswara Utama).
2. Realisasi belanja barang di Pusdiklat hanya mencapai 68,93% dari pagu, terutama dari sumber anggaran PNBPN. Dengan alasan situasi kondisi Pandemi COVID-19 pelatihan Tatap Muka tidak dapat dilakukan sehingga harus dilaksanakan secara Online, Pusdiklat belum dapat menyelenggarakan pelatihan Pranata Humas secara Online dikarenakan belum ada kurikulum dan modul untuk pelatihan berbasis online. Sesuai arahan Permenkominfo tentang JFT Pranata Humas, kewenangan kurikulum dan modul ada di IKP, selama belum ada versi online pusdiklat tidak dapat menyelenggarakan (khusus pelatihan pranata humas saja), sementara untuk pelatihan lain di PP PNBPN belum dapat dijalankan karena pola tarif yang belum sesuai (sudah diusulkan di PP PNBPN baru).
3. Pandemi Covid-19 di Tahun Anggaran 2020 juga menyebabkan realisasi belanja barang (52) pada satker STMM Yogyakarta hanya mampu mencapai angka 73,48% dibandingkan pagu anggaran. Proses peralihan perkuliahan tatap muka (termasuk masa orientasi perkuliahan, proses ujian, dan perayaan wisuda kelulusan mahasiswa) berubah menjadi system online, mengakibatkan beberapa pos anggaran tidak dapat terserap secara optimal.
4. Pusbang Proserti yang menjadi satuan kerja penyelenggara kegiatan DTS (*Digital Talent Scholarship*) yang juga tidak dapat memberikan kinerja yang optimal, dengan tingkat penyerapan anggaran belanja barang hanya mencapai 75,51% dari pagu.

Alasan secara umum adalah perubahan dari sistem pelatihan offline menjadi online menyebabkan target-target penganggaran tidak terealisasi pada masa pandemi Covid-19. Perubahan pola offline menjadi online mengurangi banyak porsi biaya perjalanan dinas panitia pengajar dan peserta, honor pengajar dan belanja bahan, bahkan khusus Online Academy (OA) hampir dapat dikatakan tidak mengeluarkan biaya hanya pengalokasi jasa profesi untuk pengajar dari Global Tech Company. Alasan lainnya adalah alokasi biaya sosialisasi dan publikasi DTS 2021 ke daerah 99% tidak terpakai sama sekali. Selama masa pandemi COVID-19 ini, jumlah peminat peserta pelatihan dan juga untuk mengikuti sertifikasi dalam program DTS rendah apabila dibandingkan dalam situasi normal.

Selama Tahun Anggaran 2020, satker Instansi Pusat BLSDM untuk unit Pusbang Proserti telah menerima 2 (dua) MP dari satker penghasil Ditjen SDPPI untuk dukungan anggaran sumber PNBPN di kegiatan DTS, dengan perincian sebagai berikut :

1. MP Pertama adalah atas dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-64/PB/2020 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp7.665.700.000,-
2. MP kedua adalah atas dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-84/PB/2020 tanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp63.598.300.000,-

Secara umum kinerja dan capaian kinerja Badan Litbang SDM tahun 2020 yang dihasilkan telah diimplementasikan secara maksimal dan dilaksanakan secara optimal. Namun demikian masih tetap diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada T-1 atau selambat-lambatnya di awal tahun berjalan.
2. Perlunya pengambilan keputusan yang bijaksana dan strategis dan puncak pimpinan dan level pengambil keputusan untuk metode pelatihan online, sebagai adaptasi keharusan peralihan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Karena perubahan pola pelatihan dari tatap muka menjadi daring menghasilkan banyak perubahan dalam mekanisme dan struktur pembiayaan, serta fleksibilitas bentuk anggaran yang bisa dilakukan.
3. Pola pencairan dana program/kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN unit kerja Ditjen SDPPI sebagai satu-satunya satker Penghasil pada kegiatan DTS di TA 2020 dapat dikatakan telah berjalan optimal, karena MP terbit pada semester ketiga (31 Agustus 2020) lalu pada awal semester keempat (08 Oktober 2020). Sehingga dapat dikatakan tidak ada permasalahan dalam metode penyiapan dana.

4. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Darurat Covid-19, mekanisme pengajuan pencairan diutamakan dengan mekanisme TUP (Tambah Uang Persediaan) rutin bulanan, berimplikasi pada metode kerja para pengelola keuangan yang harus bertanggung jawab dan bekerja sama dengan melihat satuan kerja sebagai “Tim Besar” dalam proses pengajuan SPM sampai tahapan penyerahan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dalam situasi pola kerja *Flexible Working Space* (FWS) di Tahun 2020, masih perlu banyak pembenahan.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor : S-864/PB/2020 perihal Digitalisasi Dokumen Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020, yang berimplikasi pada perubahan pola kerja alur dokumen keuangan menjadi versi digital sesuai dengan permintaan/surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Nomor 236/S/XV/11/2020. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2020, sampai dengan tahapan penyusunan Laporan Keuangan Unaudited, partisipasi PPK dalam penyelesaian digitalisasi dokumen pertanggungjawaban keuangan masih perlu ditingkatkan kesadarannya.
6. Kinerja Keuangan bilamana hanya melihat di tataran angka nilai persentase penyerapan memang sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan baik, tetapi alangkah lebih arifnya apabila tingkat keberhasilan pencapaian suatu satuan kerja juga turut mempertimbangkan nilai perangkat ASN-nya selaku sumber daya manusia yang terlindungi dari resiko pandemi.

Tabel 3.30
Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM dari Tahun 2015
Sampai Dengan Tahun 2020

KINERJA	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu Awal (Rp)	199.752.100.000	19.713.480.000	261.466.700.000	220.358.878.000	263.470.629.000	522.287.750.000
Pagu Revisi (Rp)	272.071.383.000	193.132.363.000	246.005.068.000	223.414.117.000	385.488.751.000	304.801.530.000
Realisasi (Rp)	240.825.191.629	177.338.522.514	234.963.182.466	212.708.473.582	354.473.239.980	271.407.492.196
Realisasi (%)	88,52%	91,82%	95,51%	95,21%	91,95%	89,04%

PENUTUP



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PENUTUP

Badan Litbang SDM telah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika melalui program kerja Tahun 2020 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Badan Litbang SDM Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020.

Secara keseluruhan Badan Litbang SDM telah menghasilkan kinerja yang maksimal dan optimal meskipun terdampak pada kondisi *force majeure* yang belum pernah diduga sebelumnya. Namun, diskresi pimpinan yang adaptif terhadap situasi tersebut mampu mengejar target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

Berikut ikhtisar capaian kinerja Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2020, yang dapat kami sampaikan:

1. Dari total dari 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), performa kinerja Badan Litbang SDM untuk masing-masing IKSP melebihi target ($\geq 100\%$) dengan rincian:
 - 1) Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari target 60%, realisasinya mencapai 100% sehingga prosentase capaiannya adalah **166,67%**;
 - 2) Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) dari target semula 45.000, realisasinya mencapai 58.116 sehingga prosentase capaiannya adalah **129,15%**;
 - 3) Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori *Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy* yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri, dari target semula 20%, realisasi capaiannya mencapai 33,7% sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar **168,5%**;
 - 4) Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis. yang semula ditargetkan 90% namun kinerjanya mencapai hingga 95,5% sehingga prosentase capaiannya adalah **106,11%**;
 - 5) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan 76,5, realisasi kinerjanya mencapai 91,71 sehingga prosentase capaiannya adalah **120,67%**.
 - 6) Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan 67 ternyata mampu meraih nilai 67,20 sehingga prosentase capaiannya mencapai **100,3%**;

- 7) Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019. dengan polarisasi Minimize yang semula ditargetkan 1%, ternyata prosentase besaran temuan dibandingkan realisasi adalah sebesar 0.013% dari total pagu tahun anggaran 2019 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar **100%**;
- 8) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN yang semula ditargetkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal 70% pada tahun berjalan dan 30% pada tahun sebelumnya ternyata Badan Litbang SDM mampu menyelesaikan hingga **100%** penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal pada tahun berjalan dan 100% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal pada tahun sebelumnya; dan
- 9) Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan 86, realisasi kinerjanya mencapai 94,02 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar **109,33%**.

Badan Litbang SDM perlu mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan performa kinerja, di antaranya melalui pematangan perencanaan program dan penyusunan anggaran dan kegiatan serta agenda kegiatan yang lebih optimal dan efisien. Koordinasi yang lebih intensif dengan satuan kerja di Kementerian Kominfo terutama dalam menentukan gagasan dan topik penelitian yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan pola pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis serta perubahan *mindset* dan etos kerja SDM di lingkungan Badan Litbang SDM. Identifikasi dan mitigasi risiko juga perlu diidentifikasi pada proses perencanaan suatu program agar tidak terjadi *trial and error* ketika pelaksanaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Basuki Yusuf Iskandar**
Jabatan : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : **Menteri Komunikasi dan Informatika**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra 2020 – 2024), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,



Johnny G. Plate

Pihak Pertama,



Basuki Yusuf Iskandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	60%
2.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.	1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship (DTS)</i> .	45.000
		2. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.	20%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis.	90%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM.	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM.	76,5
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM.	67
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019.	1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN.	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%
		5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM.	86

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi BBPSDMP	Rp.	17.230.899.000,-
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BPSDMP	Rp.	26.698.034.000,-
3.	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta	Rp.	54.629.416.000,-
4.	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.786.044.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	Rp.	70.754.560.000,-
6.	Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp.	11.397.435.000,-
6.	Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp.	8.488.639.000,-
7.	Pengembangan Profesi dan Sertifikasi bidang Kominfo	Rp.	104.169.836.000,-
8.	SDM Vokasi Bidang Kominfo di Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo	Rp.	3.096.684.000,-
9.	SDM Vokasi Bidang Kominfo di Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo	Rp.	5.008.259.000,-
10.	SDM Vokasi Bidang Kominfo di BPPTIK, Bekasi dan Tangerang	Rp.	1.412.606.000,-
11.	SDM Vokasi Bidang Kominfo	Rp.	35.217.212.000,-
12.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Rp.	1.943.852.000,-

Jakarta, Juni 2020

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny G. Plate

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Basuki Yusuf Iskandar